



Jl. Dr. Sutomo No. 75 Jombang

BerAKHLAK

Bewertung: 10 Punkte

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

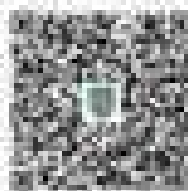
Puji syukur kepada Allah SWT, yang dengan Karunia dan Nikmat-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi tahun 2023 dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja instansi selama tahun 2024. Laporan ini berisi data kinerja yang akuntabel, meliputi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi beserta langkah-langkah alternatif solusi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Selain itu juga berisi laporan keuangan berupa data alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Penyusunan laporan demikian ini sesuai dengan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami sampaikan banyak terimakasih pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024. Mudah-mudahan laporan ini dapat memeberikan manfaat bagi internal Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 maupun ODP terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang, 15 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan

Ditandatangani secara elektronik



dr. HEXAWAN TJAHAJ WIDADA, MKP
NIP. 197106082002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Struktur Organisasi 4

 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi 5

 1.6 Isu Strategis 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 18

 3.2 Realisasi Anggaran 31

 3.3 Upaya Perbaikan Kinerja 38

BAB IV PENUTUP 42

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024	15
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	17
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024.....	18
Tabel 3.3	Capaian Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024.....	21
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.....	21
Tabel 3.5	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024	22
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional.....	23
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024.....	26
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024	31
Tabel 3.9	Efisiensi penggunaan Anggaran Tahun 2024.....	34
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024.....	37
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.....	37

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024	4

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Kementerian Kesehatan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*. Sehubungan hal tersebut, Dinas Kesehatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.2 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam rentang waktu tahun 2024.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

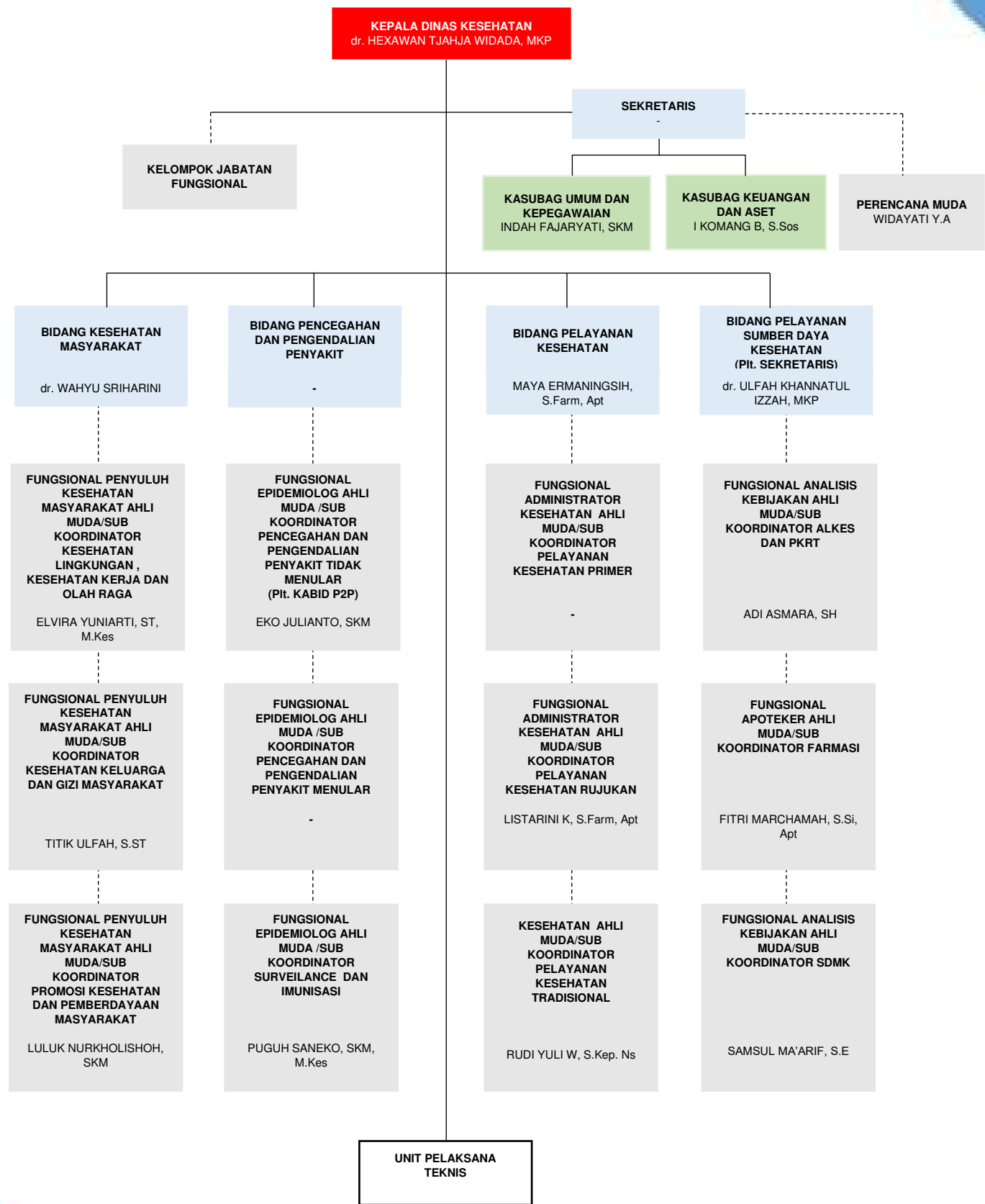
- a. Memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada publik, terutama kepada stakeholders dan masyarakat;
- b. Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan strategi pencapaiannya;
- c. Menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan strategi perbaikan pada periode berikutnya

Dengan adanya laporan ini, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dapat menunjukkan kinerjanya secara efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

I.4 Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2024 tersaji pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024



I.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018. Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menyatakan bahwa tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021, terdiri dari:

A. Kepala Dinas;

B. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan asset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Lap[oran Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, letatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melakat dalam lingkup Dinas Kesehatan;

- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Dinas Kesehatan;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Bidang Kesehatan Masyarakat,

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga yang berfungsi:

- 1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;Sub Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- 3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi kelompok jabatan fungsional.

D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji yang berfungsi:

1. Penyusunan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
4. Koordinasi di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta kesehatan haji;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional yang berfungsi:

1. Penyusunan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
3. Pelaksanaan Koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan yang berfungsi:

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan;
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;

3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
 4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
 5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Unit Pelaksana Teknis

UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, kelas B;
2. UPT Instalasi Farmasi, kelas B; dan
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat)

Puskesmas sebagai berikut:

- Puskesmas Jelakombo Jombang;
- Puskesmas Pulo Lor Jombang;
- Puskesmas Jabon Jombang;
- Puskesmas Tambakrejo Jombang;
- Puskesmas Cukir Diwek;
- Puskesmas Brambang Diwek;
- Puskesmas Blimbing Gudo;
- Puskesmas Plumbongambang Gudo;
- Puskesmas Bandarkedungmulyo;
- Puskesmas Perak;
- Puskesmas Megaluh;
- Puskesmas Tembelang;
- Puskesmas Jatiwates Tembelang;
- Puskesmas Bawangan Ploso;
- Puskesmas Kabuh;
- Puskesmas Plandaan;

- Puskesmas Tapen Kudu;
- Puskesmas Keboan Ngusikan;
- Puskesmas Mojoagung;
- Puskesmas Gambiran Mojoagung;
- Puskesmas Sumobito;
- Puskesmas Jogoloyo Sumobito;
- Puskesmas Kesamben;
- Puskesmas Blimbing Kesamben;
- Puskesmas Peterongan;
- Puskesmas Dukuhklopo Peterongan;
- Puskesmas Mayangan Jogoroto;
- Puskesmas Jarakkulon Jogoroto;
- Puskesmas Pulorejo Ngoro;
- Puskesmas Kesamben Ngoro;
- Puskesmas Mojowarno;
- Puskesmas Japanan Mojowarno;
- Puskesmas Bareng;
- Puskesmas Wonosalam.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

I.6 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan *Continuum of care* di Kabupaten Jombang
Continuum of care adalah sebuah pendekatan sistematis dalam memberikan layanan kesehatan yang berkelanjutan dan terkoordinasi kepada individu, yang mencakup berbagai tahap perawatan sepanjang perjalanan hidup mereka mulai dalam kandungan sampai dengan lanjut usia.
2. Belum tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Jombang
Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah suatu konsep yang mengacu pada sistem kesehatan yang memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki

akses yang adil dan setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa harus menghadapi kesulitan keuangan.

3. Adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah situasi di mana terjadi lonjakan atau wabah suatu penyakit menular yang seharusnya bisa dicegah dengan vaksinasi, namun penyakit tersebut kembali muncul atau menyebar di suatu wilayah dalam jumlah yang lebih tinggi dari biasanya.

4. Belum terintegrasinya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara terintegrasi adalah pendekatan yang melibatkan upaya-upaya kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular (yang disebabkan oleh infeksi) dan penyakit tidak menular (yang umumnya disebabkan oleh gaya hidup atau faktor genetik) dalam satu sistem yang terpadu, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kesehatan masyarakat.

5. Masih banyaknya fasyankes dan penyehat tradisional yang belum memenuhi standar mutu

Masalah masih banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan penyehat tradisional yang belum memenuhi standar mutu adalah tantangan besar dalam sistem kesehatan. Fasyankes yang dimaksud bisa berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, laboratorium, dan lainnya yang berperan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, penyehat tradisional merujuk pada praktik penyembuhan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menggunakan metode tradisional, seperti ramuan herbal, pijat, dan lainnya.

6. Ketersediaan tenaga kesehatan di faskes yang belum sesuai standar kebutuhan tenaga

Ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang belum sesuai dengan standar kebutuhan tenaga merupakan salah satu masalah besar dalam sistem kesehatan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kesehatan yang ada dan jumlah atau jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan di berbagai fasilitas kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

7. Belum optimalnya penyedia farmasi, makanan dan minuman yang sesuai dengan standar

Belum optimalnya penyedia farmasi, makanan, dan minuman yang sesuai dengan standar merupakan masalah yang berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Penyediaan farmasi, makanan, dan minuman yang tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan berbagai masalah, baik itu terkait dengan kualitas, keamanan, maupun efektivitas produk. Hal ini berpengaruh langsung pada kesehatan individu dan masyarakat, serta berisiko meningkatkan beban sistem kesehatan.

8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat merupakan tantangan yang cukup besar dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan di masyarakat karena kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Kepala Dinas Kesehatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024
sebagaimana terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)	1,13
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A (82,16)
		Nilai IRB	B (70,00)

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100%	Rp. 97.616.277.880,00
2.	Meningkatnya Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	100 per 100.000 KH	Rp. 217.654.908.474,00
			Angka Kematian Bayi (AKB)	6,6 per 1000 KH	
			Angka Kematian Balita (AKBAL)	1 per 1000 KH	
			Prevalensi Stunting	9%	
			Persentase kecamatan sehat	33,33%	
			Universal Health Coverage (UHC)	98%	
			Persentase Desa UCI	88%	
			Insiden Rate Penyakit Menular	1,25%	
			Tingkat kemandirian ODGJ Berat	80%	
			Insiden Rate Diabetes Mellitus dan Hipertensi	50%	

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
			Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar	85%	
			Persentase Ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar	94%	
3.	Meningkatnya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	95%	Rp. 2.301.725.200,00
4.	Meningkatnya Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	95%	Rp. 104.697.050,00
5.	Meningkatnya Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	50%	Rp. 1.985.829.500,00
Jumlah					Rp. 319.663.438.104,00

Perjanjian Kinerja pada tabel 2.1 merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kesehatan sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui Pengukuran Kinerja. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Untuk memudahkan intepretasi pencapaian indikator sasaran dalam penilaian kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	>110%-120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>90%-110%	Baik (Berhasil)
3	>70%-80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>50%-70%	Kurang
5	0%-50%	Sangat Kurang

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kerja (*Performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Tingkat Realisasi Positif

Realisasi

$$\text{Capaian} = \frac{\text{-----}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif

Target – (Realisasi – Target)

$$\text{Capaian} = \frac{\text{-----}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2024 terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,13	0,99	87,16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A (82,16)	A (80,01)	97,38
	Nilai IRB	B (70)	BB (77,47)	110,67

Sumber : Laporan Capain Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 dan LHE penilaian SAKIP dan RB

Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat disusun berdasarkan pada 15 indikator program Dinas Kesehatan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Tahun 2024

No	Indikator Program	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%) Maks 120%	Bobot	Indeks
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	100/100000 KH	113,67/100000 KH	86,33%	86,33%	7%	0,06
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,6/1000 KH	8,01/1000 KH	78,64%	78,64%	7%	0,06
3	Angka Kematian Balita (AKBAL)	1/1000 KH	0,15/1000 KH	185,00%	120%	7%	0,08
4	Universal Health Coverage	98%	97,8%	99,79%	99,79%	7%	0,07
5	Prevalensi Stunting	9%	4,46%	150,44%	120%	7%	0,08
6	Persentase Kecamatan Sehat	33,33%	33,33%	100%	100%	6%	0,06
7	Persentase Desa UCI	88%	56,86%	64,61%	64,61%	6%	0,04
8	Insiden Rate Penyakit DM dan HT	50%	84,50%	169%	120%	7%	0,08
9	Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	80%	72,05%	90,06%	90,06%	6%	0,05
10	Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar	85%	95,00%	111,76%	111,76%	8%	0,09
11	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BHP di	94%	99,50%	105,85%	105,85%	6%	0,06

No	Indikator Program	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%) Maks 120%	Bobot	Indeks
	FKTP sesuai kebutuhan						
12	Insiden Rate Penyakit Menular	1,25%	0,95%	124,00%	120%	7%	0,08
13	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	95%	95,50%	100,53%	100,53%	6%	0,06
14	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Faskes Sesuai Standar	95%	99,97%	105,23%	105,23%	6%	0,06
15	Persentase Rumah Tangga sehat	50%	46,38%	92,72%	92,72%	7%	0,06
IKKM TAHUN 2024							0,99

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat tercapai 87,16% di tahun 2024. Mendasar pada capaian indickator program pada tabel 3.3, maka faktor penyebab tidak tercapainya target Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Jombang;
- b. Masih rendahnya bayi dan balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap dikarenakan adanya keterbatasan vaksin dari Pemerintah sehingga berdampak terhadap menurunnya sistem kekebalan tubuh pada bayi dan balita;
- c. Jaminan kesehatan yang masih belum merata sehingga berdampak pada keterbatasan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan;
- d. Masih rendahnya kepedulian keluarga terhadap pasien ODGJ sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat kemandirian ODGJ dalam menjalankan aktivitas sehari hari;

- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat terutama kebiasaan merokok di dalam keluarga sehingga berdampak terhadap tidak optimalnya rumah tangga sehat.

Tabel 3.2 juga menunjukkan bahwa indeks nilai SAKIP dan nilai RB telah mencapai target walaupun secara angka untuk nilai SAKIP masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian target sasaran strategis meningkatnya kualitas akutabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen dan peran serta seluruh karyawan Dinas Kesehatan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
- b. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap tidak maksimalnya capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan adalah masih kurangnya internalisasi implementasi SAKIP sampai pada level pelaksana sehingga diperlukan adanya pembinaan secara rutin dalam rangka internalisasi SAKIP di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan melibatkan seluruh karyawan.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Dlnas Kesehatan Kabupaten Jombang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,13	1,02	0,86	0,99

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2023. Namun capaian selama 3 (tiga) tahun terakhir masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang menjadi faktor penghambat ketercapaian kinerja selama 3 tahun terakhir adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi serta masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Dengan demikian, Dinas Kesehatan harus menyusun strategi yang lebih mendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan serta melaksanakan strategi tersebut secara terintegrasi dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait bidang kesehatan.

3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun ini dengan target jangka menengah terlihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,36	0,99	72,79
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	100
	Nilai IRB	A	BB	83,3

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa tingkat kemajuan capaian indikator kinerja utama Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat sebesar 72,79% jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra. Masih belum optimalnya pencapaian indeks kualitas kesehatan masyarakat dikarenakan oleh beberapa hal berikut:

1. Tingginya Angka Kematian Ibu yang dikarenakan oleh adanya komplikasi ibu hamil serta keterlambatan rujukan ke RS rujukan
2. Tingginya Angka Kematian Bayi yang dikarenakan Berat Bayo Lahir Rendah (BBLR), adanya komplikasi pada bayi serta keterlambatan rujukan ke RS rujukan
3. Kebiasaan merokok yang sulit diintervensi oleh petugas kesehatan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan bahaya merokok bagi diri sendiri maupun bagi orang lain (perokok pasif)
4. Masih rendahnya tingkat kemandirian ODGJ berat yang berdampak terhadap rendahnya kualitas pasien yang sudah pulih karena tidak dapat menjadi lebih produktif

5. Rendahnya cakupan imunisasi yang dikarenakan oleh keterbatasan vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 3.5 juga menunjukkan bahwa nilai SAKIP OPD sudah 100% jika dibandingkan dengan target pada periode Renstra. Namun untuk capaian indeks reformasi birokrasi Dinas Kesehatan masih 83,3% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan upaya yang lebih berdaya ungkit dalam peningkatan capaian kinerja sehingga dapat mencapai target pada akhir periode renstra.

3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional terlihat pada table 3.6.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Nasional	Ket
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	0.99	-	Tidak dapat dibandingkan karena merupakan IKKM merupakan indikator yang bersifat kewilayahan khusus Kabupaten Jombang
Meningkatnya Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	113,67/100000KH	-	Belum bisa dibandingkan dengan realisasi nasional karena Profil Kesehatan belum dirilis
	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,01/1000 KH	-	
	Angka Kematian Balita (AKBAL)	0,15/1000 KH	-	
	Prevalensi Stunting	4,46%	-	
	Universal Health Coverage	97,8%	98,19%	
	Persentase Kecamatan Sehat	33,33%	-	Indikator kewilayahan

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Nasional	Ket
	Persentase Desa UCI	56,86%	-	Belum bisa dibandingkan dengan realisasi nasional karena Profil Kesehatan belum dirilis
	Insiden Rate Penyakit DM dan HT	84,50%	-	Indikator kewilayahan
	Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	72,05%	-	Indikator kewilayahan
	Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar	95,00%	-	Belum bisa dibandingkan dengan realisasi nasional karena Profil Kesehatan belum dirilis
	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan	99,50%	-	
	Insiden Rate Penyakit Menular	0,95%	-	Indikator kewilayahan
Meningkatnya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Faskes Sesuai Standar	95,50%	-	Indikator kewilayahan
Meningkatnya Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	99,97%	-	Indikator kewilayahan
Meningkatnya Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga sehat	46,38%	-	Belum bisa dibandingkan dengan realisasi nasional karena Profil Kesehatan belum dirilis

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa IKU Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM) merupakan target yang bersifat kewilayahan khusus Kabupaten Jombang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat merupakan indikator yang tersusun atas 15 (lima belas) indikator program. Dari 15 (lima belas) indikator program tersebut, terdapat beberapa indikator yang bersifat kewilayahan khusus di Kabupaten Jombang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target nasional. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)
2. Insiden Rate Penyakit Menular
3. Insiden Rate Penyakit DM dan HT
4. Tingkat Kemandirian ODGJ berat
5. Persentase sumber daya manusia kesehatan di faskes memenuhi standar
6. Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar
7. Persentase Kecamatan Sehat

Dari indikator program penyusun IKKM, terdapat 10 (sepuluh) indikator program yang seharusnya bisa dibandingkan dengan realisasi Nasional yaitu:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Anak Balita (AKBAL)
4. Universal health Coverage (UHC)
5. Prevelensi Stunting
6. Persentase Desa UCI
7. Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar
8. Persentase ketersediaan obat, vaksin dan PHP di FKTP sesuai kebutuhan
9. Persentase Rumah Tangga Sehat

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa sampai saat ini, indikator yang bisa dibandingkan adalah Universal Health Coverage (UHC) di tingkat nasional. Berdasarkan data tersebut, maka UHC di Kabupaten Jombang berada dibawah capaian Nasional. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pembayaran premi PBPU dan BP Kelas 3. Sebaia upaya untuk mengatasi adanya permasalahan terkait dengan pembiayaan kesehatan, maka Kabupaten Jombang menjalankan kebijakan pembiayaan bagi masyarakat miskin dan kondisi tertetntu di Puskesmas dan Rumah sakit milik Pemerintah Daerah. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan.

Namun, dikarenakan sampai saat ini Profil Kesehatan Nasional Tahun 2024 belum dikeluarkan maka data pembandingan di tingkat nasional masih belum ada sehingga belum bisa dilakukan analisis tingkat ketercapaian indikator kinerja dibandingkan dengan target nasional untuk beberapa indikator lainnya.

3.1.5. Analisis Atas Realisasi Kinerja

Dengan memperhatikan pencapaian kinerja tahun 2024, maka dapat diinformasikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian sasaran serta tindak lanjut atas faktor penghambat sebagaimana terlihat dalam tabel 3.7 sebagai berikut.

Tabel 3.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Prorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
				1) Angka Kematian Ibu (AKI)	1. Penguatan ANC terpadu 2. Peran serta masyarakat dalam pemberian dukungan pada ibu hamil 3. Kesiapan RS Rujukan untuk menerima rujukan	1. Adanya komplikasi ibu hamil 2. Keterlambatan rujukan karena adanya penolakan dari keluarga 3. Regulasi BPJS terkait dengan rujukan pasien	Pencegahan Kematian Ibu terintegrasi
				2) Angka Kematian Bayi (AKB)	1. Kesiapan Puskesmas RS Rujukan milik Pemerintah Daerah untuk menerima rujukan 2. Pelayanan neonatal sesuai standar	1. Adanya komplikasi dari ibu 2. Keterbatasan RS swasta dalam rujukan kasus neonatal	Pencegahan Kematian bayi terintegrasi
				3) Angka Kematian Balita	1. Adaya kelas ibu balita 2. Pelaksanaan SDIDTK di Posyandu	1. Kurangnya tingkat pengetahuan ibu tentang kesehatan balita	Pencegahan Kematian balita terintegrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
				4) Universal Health Coverage	1 Koordinasi lintas sector yang cukup baik 2 Penerapan Kebijakan Yankesmas kin	Keterbatasan anggaran pemerintah daerah	CSR jaminan kesehatan dan penyediaan anggaran yankesmaskin
				3 Prevalensi Stunting	1. Adanya support Dana Desa untuk Penurunan Prevalensi Stunting; 2. Adanya support kebijakan dari stakeholder untuk penurunan prevalensi Stunting; 3. Adanya Tim Lintas Sektor pengendalian Stunting. 4. Pemenuhan PMT untuk balita stunting dan bumil KEK 5. Sinergitas dengan dokter spesialis anak dalam penanganan kasus stunting	1. Penyakit penyerta pada balita stunting 2. Pola asuh orang tua yang salah terkait Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi
				4 Persentase Kecamatan Sehat	1. Dungan lintas sector sampai di tingkat desa 2. Kesiapan Puskesmas dalam memberikan edukasi terkait lingkungan sehat	1. Perilaku Hidup bersih dan sehat yang masih belum optimal di masyarakat	Optimalisasi peran desa dan kader dalam mewujudkan kecamatan sehat
				5 Persentase Desa UCI	2. Program imunisasi anak sekolah 3. Meningkatnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita.	1. Masih adanya Keterbatasan stok vaksin dari pusat	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Pusat
				6 Insiden Rate Penyakit Menular	1. Penanganan kesehatan bagi penderita penyakit menular sesuai standar	Peningkatan kasus penyakit menular di masyarakat seperti HIV dan TBC	Peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
					2. Ketersediaan obat yang cukup		penyakit menular terutama TBC dan HIV
			7	Insiden Rate DM dan HT	1. Dilaksanakannya program GERMAS 2. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga rutin; 3. Kesadaran masyarakat untuk mengatur pola makan dan menu gizi seimbang; 4. Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok.	1. Adanya pola hidup masyarakat yang tidak sehat; 2. Adanya perilaku masyarakat yang tidak sehat;	Peningkatan KIE di masyarakat tentang penyakit DM dan HT
			8	Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	1. Terlaksananya Posyandu Jiwa 2. Pelatihan Kerja dan prakarya bagi ODGJ Berat 3. Melibatkan ODGJ berat dalam pekerjaan social, misalnya diberdayakan membantu sebagai kader posyandu, dll.	1. Keluarga pasien ODGJ Berat yang tidak kooperatif dengan petugas kesehatan untuk program pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ Berat; 2. Adanya penderita ODGJ Berat yang tidak mau hadir atau mengakses layanan kesehatan jiwa (missal: Posyandu Jiwa)	Peningkatan KIE di masyarakat tentang penyakit gangguan jiwa
			9	Persentase fasilitasi kesehatan memenuhi standar	1. Komitmen Tim Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) 2. Komitmen Tim Mutu Faskes 3. Kolaborasi antar jaringan di wilayah	1. Keterbatasan anggaran di FKTP khususnya klinik swasta	Pembinaan secara berkelanjutan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
					kerja Puskesmas		
				10 Persentase ketersediaan Obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan	1. Obat, vaksin dan BHP di FKTP ketersediaannya dicukupi di Dinas kesehatan; 2. Perencanaan kebutuhan yang tepat untuk pengadaan Obat, Vaksin, dan BHP di Dnas Kesehatan.	1. Kelangkaan Suppaly/produksi dari penyedia untuk Obat, vaksin dan BHP. 2. Keterlambatan jadwal penerbitan e katalog, sehingga menghambat penyediaan	Pelaksanaan manajemen obat dan vaksin
			2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
				Persentase sumber daya manusia kesehatan di faskes memenuhi standar	1. Uji kompetensi bagi tenaga kesehatan; 2. Penempatan jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan tenaga kesehatan.	1. Penempatan tenaga kesehatan pada Jabatan yang tidak sesuai, 2. Pemberian tugas tambahan pada tenaga kesehatan diluar kompetensinya 3. Adanya kebijakan yang tidak membolehkan rekrutment tenaga honorer	Distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan
			3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			
				Persentase Penyedia Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	1) Adanya penyuluhan keamanan pangan 2) Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait perizinan bagi penyedia sediaan farmasi, alat kesehatan,	1) Minimnya anggaran pembinaan di Dinas Kesehatan	Kerjasama dengan OPD terkait dalam hal pembinaan penyedia sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi
					makanan dan minuman		
			4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
				Persentase Rumah Tangga Sehat	1) Banyaknya Keluarga yang termasuk kategori keluarga Sehat; 2) Pelaksanaan Pembinaan PHBS secara berkelanjutan oleh Puskesmas 3) Ketersediaan Kader kesehatan di setiap Puskesmas	1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan KIE kepada masyarakat tentang PHBS
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Komitmen seluruh karyawan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	Penguatan komitmen secara berkesinambungan

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024 tertuang pada tabel 3.8

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2024

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,13	0,99	87,16	228.793.337.134	213.348.195.720	93,25
Meningkatnya Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	100/ 100000KH	113,67/ 100000KH	86,33%	224.401.085.384	209.527.242.370	93,37
	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,6/ 1000 KH	8,01/ 1000KH	78,64%			
	Angka Kematian Balita (AKBAL)	1/ 1000 KH	0,15/ 1000 KH	120%			
	Prevalensi Stunting	98%	4,46%	99,79%			
	Universal Health Coverage	9%	97,8%	120%			
	Persentase Kecamatan Sehat	33,33%	33,33%	100%			
	Persentase Desa UCI	88%	56,86%	64,61%			
	Insiden Rate Penyakit DM dan HT	50%	84,50%	120%			
	Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	80%	72,05%	90,06%			

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar	85%	95,00%	111,76%			
	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan	94%	99,50%	105,85%			
	Insiden Rate Penyakit Menular	1,25%	0,95%	120%			
Meningkatnya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Faskes Sesuai Standar	95%	95,50%	100,53%	2.301.725.200	1.858.222.950	80,73
Meningkatnya Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	95%	99,97%	105,23%	104.697.050	96.120.200	91,81
Meningkatnya Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga sehat	50%	46,38%	92,72%	1.985.829.500	1.866.610.200	94

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebesar 93,25% tidak diikuti dengan capaian kinerja. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran yang Tidak Tepat Sasaran

Anggaran yang dikeluarkan mungkin tidak digunakan secara efisien atau tidak diarahkan ke area yang memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target. Misalnya, meskipun anggaran besar, jika dana tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan administratif atau operasional yang tidak mendukung pencapaian tujuan utama, maka target tetap sulit tercapai.

2. Perencanaan yang Tidak Matang

Jika perencanaan awal kurang tepat atau tidak realistis, maka meskipun anggaran sudah dialokasikan dengan besar, eksekusi yang buruk bisa menghalangi pencapaian target. Perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak efektif.

3. Kurangnya Evaluasi dan Pengendalian

Anggaran yang besar sering kali disertai dengan pengendalian yang lemah dalam pelaksanaannya. Jika tidak ada evaluasi berkala, maka pengeluaran bisa tidak sesuai dengan prioritas, sehingga meskipun anggaran besar, hasil yang diharapkan tidak tercapai.

4. Masalah Eksternal yang Tidak Dapat Dikelola

Terkadang, faktor eksternal seperti perubahan pasar, regulasi, atau kondisi ekonomi yang tidak terduga bisa memengaruhi pencapaian target. Dalam hal ini, meskipun anggaran sudah besar, faktor-faktor luar tersebut bisa menghambat pencapaian tujuan.

5. Tujuan yang Tidak Spesifik atau Terukur

Kadang-kadang, target yang tidak jelas atau tidak terukur dapat menyebabkan kebingungannya dalam hal prioritas dan alokasi anggaran. Sebagai contoh, jika tujuan yang ditetapkan terlalu luas atau tidak terdefinisi dengan baik, sulit untuk mencapainya meskipun ada banyak dana yang disediakan.

6. Keterbatasan dalam Implementasi atau Infrastruktur

Meskipun anggaran besar, jika infrastruktur atau sistem yang ada tidak mendukung implementasi, maka proses mencapai target akan terhambat. Hal ini bisa berkaitan dengan teknologi yang tidak memadai atau infrastruktur fisik yang belum siap untuk mendukung kegiatan.

7. Overestimasi Kemampuan atau Sumber Daya yang Ada

Kadang-kadang, ada ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kemampuan organisasi untuk menggunakan anggaran besar. Tanpa perhitungan yang

tepat tentang sumber daya yang ada, anggaran besar mungkin hanya menghasilkan sedikit dampak, atau lebih parahnya, mengarah pada pemborosan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penting untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana anggaran dikelola, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan apakah tujuan yang ditetapkan realistis dan terukur sehingga anggaran yang dikelola berdampak terhadap capaian indicator kinerja.

3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

Efisiensi = Persentase Capaian Kinerja – Persentase Sumber Daya

- Jika hasil perhitungan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika hasil perhitungan kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.
- Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target indikator kinerja pada periode tersebut tercapai

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung ketreapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
SASARAN STRATEGIS				
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP	100%	92,24%	7,76
PROGRAM				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	81,10%	90.17%	-

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
SASARAN STRATEGIS				
Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)	87,16%	93,25	-
PROGRAM				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Prorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	101,42%	93,37%	8,05
	Angka Kematian Bayi (AKB)			
	Angka Kematian Balita			
	Prevalensi Gizi Buruk			
	Prevalensi Stunting			
	Persentase Rumah Sehat			
	Persentase Desa UCI			
	Insiden Rate Penyakit Menular			
	Insiden Rate penyakit DM dan HT			
	Tingkat Kemandirian ODGJ Berat			
	Persentase fasilitasi kesehatan memenuhi standar			
	Persentase ketersediaan Obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Faskes memenuhi Standar	105,23	80,73	24,5
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100,53	91,81	8,72
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	92,76	94	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat efisiensi anggaran dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat. Namun, terdapat efisiensi anggaran pada 3 (tiga) program yaitu:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Prorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Faktor pendorong terdapatnya efisiensi pada program tersebut antara lain:

- a. Perencanaan Anggaran yang Matang dan Berdasarkan Prioritas
- b. Pengelolaan Sumber Daya yang Efektif
- c. Monitoring dan Evaluasi yang Tepat, dan
- d. Kemitraan dan Kolaborasi yang cukup baik dengan lintas program dan lintas sector terkait

Tidak terdapatnya efisiensi pada beberapa sasaran strategis dan program di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dikarenakan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor yang penyebab tidak tercapainya efisiensi anggaran adalah:

- a. Aktivitas yang disusun tidak berdaya ungkit terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh internal organisasi seperti budaya dan lingkungan sosial terutama dalam peningkatan kasus kematian ibu, kematian bayi dan kematian balita serta perilaku hidup bersih dan sehat khususnya kebiasaan merokok.
- c. Perkembangan penyakit di masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga menjadikan insiden rate penyakit menular maupun tidak menular cenderung mengalami peningkatan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan pada proses perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta aktivitas mendasar pada akar penyebab masalah sehingga aktivitas yang disusun merupakan aktivitas yang berdaya ungkit terhadap indikator dan target yang telah ditetapkan.
- b. Penguatan pengawasan internal secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan program.
- c. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit dan cara pencegahannya.

- d. Berkolaborasi dengan lintas program dan perangkat daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan kesehatan sesuai dengan kewenangannya sehingga anggaran yang dikeluarkan dalam intervensi permasalahan kesehatan menjadi lebih efektif dan efisien

Selain itu, Sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya manusia hanya dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis di Dinas Kesehatan karena pada implementasinya, seluruh sumber daya yang ada selalu bekerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan. Tingkat efisiensi hasil capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabuapetan Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Sumber Daya Manusia 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan SDM (ABK)	Ketersediaan SDM	% Ketersediaan SDM
1	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)	1.13	0.99	87,16%	185	81	43,09%
Persentase capaian kinerja					87,16%	Persentase Ketersediaan SDM		43,09%
Tingkat Efisiensi = - (Efisiensi tidak tercapai)								

Sumber : ABK Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia untuk pencapaian indikator Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat tidak didapatkan efisiensi dikarenakan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan SDM hanya sebesar 43,09%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang masih sangat kurang.

Namun, Dinas Kesehatan dibantu oleh Puskesmas selaku UPT dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan kesehatan yang telah ditetapkan. Puskesmas menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan UKM dan UKP kepada masyarakat. Dengan adanya status pengelolaan keuangan BLUD, diharapkan sakan dapat membantu Dinas Kehatan dalam optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana terlihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Ketersediaan Sarana dan Prasarana Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan Sarpras	Ketersediaan Sarpras	% Ketersediaan Sarpras
1	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (IKKM)	1.13	0.99	87,16%	2.777 Unit	468 Unit	16,85%
Persentase capaian kinerja					87,16%	Persentase Ketersediaan Sarpras		16,85%
Tingkat Efisiensi = - (Efisiensi tidak tercapai)								

Perhitungan efisiensi ketersediaan sarana dan prasarana dilihat berdasarkan pemenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada tahun 2024. Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam pencapaian target indikator Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat tidak didapatkan efisiensi.

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa belum seluruh kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di Dinas kesehatan Kabupaten Jombang. Tabel 3.12 juga menunjukkan adanya keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang namun keterbatasan tersebut bukan menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3.3. UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan analisis kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, maka upaya perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Transformasi Layanan Primer
Transformasi layanan primer fokus pada penguatan aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak masyarakat sehat, memperbaiki skrining kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer. Pada

pelaksanaannya, fokus utama tersebut dapat dijabarkan menjadi 4 hal diantaranya adalah:

- Edukasi Penduduk, Yaitu dengan melakukan penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, menggunakan platform digital dan tokoh masyarakat.
- Pencegahan Primer, hal ini dilakukan dengan melakukan penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.
- Pencegahan Sekunder, yaitu dengan melakukan skrining 14 penyakit penyebab kemaian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining, stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi
- Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer, dengan melakukan revitalisasi network dan standarisasi layanan di Puskesmas, posyandu, dan kunjungan Rumah.

- Transformasi Layanan Rujukan

Transformasi layanan rujukan memiliki fokus untuk melakukan peningkatan dalam hal kualitas serta pemerataan layanan kesehatan. Adapun dalam penerapannya, hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier melalui pembinaan secara berkelanjutan.

- Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan

Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan memiliki fokus untuk memberikan adanya kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan, terutama masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu. Pada regulasi pembiayaan kesehatan tersebut, terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah dengan memastikan ketersediaan, memastikan kecukupan dan berkelanjutan serta teralokasi dengan adil, dan yang terakhir adalah memastikan pemanfaatan yang efektif dan efisien.

- Transformasi Teknologi Kesehatan

Transformasi Teknologi Kesehatan memiliki peran untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan bio-teknologi yang berada di sekitar kesehatan. Saat ini transformasi terkait dengan teknologi kesehatan yang sudah dijalankan adalah terintegrasi SIMPUS dalam Platform SATUSEHAT.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dilakukan melalui Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Transformasi SDM Kesehatan

akan berfokus untuk memastikan pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di Puskesmas se Kabupaten Jombang.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Upaya Perbaikan kinerja dalam program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman adalah sebagai berikut:

- **Penguatan pengawasan dan regulasi**

Memastikan bahwa semua obat yang beredar di pasar memenuhi standar kualitas dan keamanan melalui pengawasan yang lebih ketat dari BPOM dan instansi terkait.

- **Peningkatan distribusi dan ketersediaan obat**

Mengoptimalkan sistem distribusi obat agar selalu tersedia di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, atau apotek. Menjamin tidak terjadinya kekosongan pasokan obat-obatan yang penting.

- **Edukasi penggunaan obat yang tepat**

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan tentang penggunaan obat yang rasional dan bijak, termasuk memberikan informasi tentang dosis, efek samping, dan interaksi obat.

- **Peningkatan layanan farmasi di fasilitas kesehatan**

Menambah jumlah tenaga apoteker dan meningkatkan kompetensi mereka agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti konsultasi penggunaan obat, perencanaan terapi, dan pengawasan terapi obat.

- **Pengembangan sistem informasi obat**

Membangun sistem informasi untuk memonitor penggunaan dan persediaan obat secara real-time di fasilitas kesehatan dan apotek.

- **Peningkatan pengawasan dan standar kualitas alat kesehatan**

Memastikan bahwa alat kesehatan yang beredar memenuhi standar nasional dan internasional dalam hal kualitas dan keamanan. Pengawasan terhadap distribusi alat kesehatan harus lebih ketat untuk mencegah peredaran alat kesehatan yang tidak sesuai standar.

- **Pengawasan kualitas makanan dan minuman**

Memastikan bahwa semua produk makanan dan minuman yang diproduksi dan dijual memenuhi standar keamanan pangan dan tidak mengandung bahan berbahaya. Ini termasuk pengawasan dari BPOM dan lembaga terkait.

- **Pendidikan tentang pola makan sehat**

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi untuk mencegah penyakit degeneratif, seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas.

- **Penanganan pangan yang aman**

Memastikan bahwa cara penyimpanan, pengolahan, dan distribusi makanan serta minuman dilakukan dengan higienis untuk menghindari kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Perbaikan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan bertujuan untuk mengaktifkan peran serta masyarakat dalam menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatannya. Berikut adalah beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja program ini:

- a. Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan Kesehatan
- b. Pemberdayaan Kader Kesehatan
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- d. Peningkatan Kolaborasi dengan Sektor Lain

Perbaikan kinerja program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, dan sektor terkait lainnya. Dengan langkah-langkah yang terencana, program ini dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

- Penyusunan rencana anggaran disesuaikan dengan capaian indikator kinerja pada periode sebelumnya serta permasalahan yang ada;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk realisasi anggaran dan kegiatan sebagai dasar untuk perbaikan perencanaan;
- Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
- Optimalisasi pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan di seluruh aktivitas

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

A. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa belum seluruh IKU telah tercapai dengan baik sehingga diperlukan adanya upaya yang lebih nyata dalam rangka pencapaian kinerja organisasi pada periode selanjutnya berdasarkan analisa yang dilakukan secara mendalam terhadap faktor penghambat dan pendorong keberhasilan kinerja.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai upaya peningkatan capaian kinerja untuk peningkatan mutu layanan UKP dan UKM sesuai standar mutu dan sesuai harapan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Transformasi Layanan Primer
 - Transformasi Layanan Rujukan
 - Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan
 - Transformasi Teknologi Kesehatan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dilakukan melalui Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Transformasi SDM Kesehatan akan berfokus untuk memastikan pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di Puskesmas se Kabupaten Jombang.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - Penguatan pengawasan dan regulasi
 - Peningkatan distribusi dan ketersediaan obat
 - Edukasi penggunaan obat yang tepat
 - Peningkatan layanan farmasi di fasilitas kesehatan
 - Pengembangan sistem informasi obat
 - Peningkatan pengawasan dan standar kualitas alat kesehatan
 - Pengawasan kualitas makanan dan minuman

- Pendidikan tentang pola makan sehat
- Penanganan pangan yang aman
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - a. Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan Kesehatan
 - b. Pemberdayaan Kader Kesehatan
 - c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
 - d. Peningkatan Kolaborasi dengan Sektor Lain
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
 - Penyusunan rencana anggaran disesuaikan dengan capaian indikator kinerja pada periode sebelumnya serta permasalahan yang ada;
 - Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk realisasi anggaran dan kegiatan sebagai dasar untuk perbaikan perencanaan;
 - Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
 - Optimalisasi pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan di seluruh aktivitas

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**
- 3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja**
- 4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi**
- 5. Pengukuran Kinerja**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 060.1/62/415.01/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAIFUL ANWAR, S.T**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Kesehatan**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

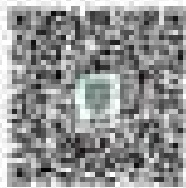
Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 17 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Dinas Kesehatan

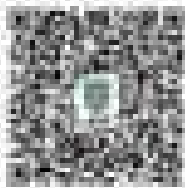
Ditandatangani secara elektronik



SYAIFUL ANWAR, S.T
NIP. 197803192005011015

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



KODE UNIT : 415.17

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,44
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A
		Nilai IRB	B

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Rp. 98.827.119.997,00
2.	Meningkatnya Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	100 per 100.000 KH	Rp. 86.498.535.776,00
			Angka Kematian Bayi (AKB)	6,6 per 1000 KH	
			Angka Kematian Balita	1 per 1000 KH	
			Prevalensi Stunting	9%	
			Persentase kecamatan sehat	33,33%	
			Universal Health Coverage (UHC)	90%	
			Persentase Desa UCI	88%	
			Insiden Rate Penyakit Menular	1,25%	
			Tingkat kemandirian ODGJ Berat	80%	
			Insiden Rate Diabetes Mellitus dan Hipertensi	50%	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar	60%	
			Persentase Ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar	92%	

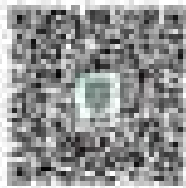


KODE UNIT : 415.17

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
3.	Meningkatnya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	80%	Rp. 1.439.707.000,00
4.	Meningkatnya Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	58%	Rp. 104.697.050,00
5.	Meningkatnya Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	50%	Rp. 220.799.000,00
Jumlah					Rp. 187.090.858.823,00

Jombang, 17 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Dinas Kesehatan

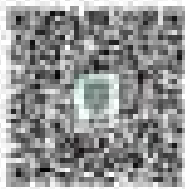
Ditandatangani secara elektronik



SYAIFUL ANWAR, S.T
NIP. 197803192005011015

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

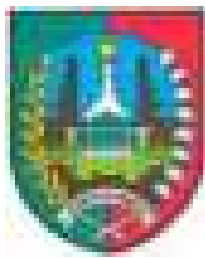
Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



KODE UNIT : 415.17



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 000.8.6.3/571/415.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP**
Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 8 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kesehatan
Ditandatangani secara elektronik

\$_{ttd1}\$

dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP
NIP. 197106082002121006

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

\$_{ttd2}\$

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



KODE UNIT : 415.17

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,13
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A
		Nilai IRB	B

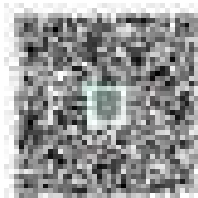
NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Rp. 97.616.277.880,00
2.	Meningkatnya Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	100 per 100.000 KH	Rp. 217.654.908.474,00
			Angka Kematian Bayi (AKB)	6,6 per 1000 KH	
			Angka Kematian Balita (AKBAL)	1 per 1000 KH	
			Prevalensi Stunting	9%	
			Persentase kecamatan sehat	33,33%	
			Universal Health Coverage (UHC)	98%	
			Persentase Desa UCI	88%	
			Insiden Rate Penyakit Menular	1,25%	
			Tingkat kemandirian ODGJ Berat	80%	
			Insiden Rate Diabetes Mellitus dan Hipertensi	50%	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar	85%	
			Persentase Ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar	94%	



KODE UNIT : 415.17

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
3.	Meningkatnya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	95%	Rp. 2.301.725.200,00
4.	Meningkatnya Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	95%	Rp. 104.697.050,00
5.	Meningkatnya Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	50%	Rp. 1.985.829.500,00
Jumlah					Rp. 319.663.438.104,00

Jombang, 8 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kesehatan
Ditandatangani secara elektronik



dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP
NIP. 197106082002121006

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



KODE UNIT : 415.17



KELOMPOK KERJA KEMERDEKAAN PERUMSI

PROSEDUR PERALAMAN DEP 1 TERBUK

PERMINTAAN KALAH BERKUALITAS

PERMINTAAN PERALAMAN

1 JANUARI 2021-31 DESEMBER 2021

1. PERALAMAN YANG TERBUK	
NAMA	di PERALAMAN TERBUK WICAKA, M.B.P.
NIK	1910000000000000000
PANGKAT/URUS BUKU	Pangkat/Pangkat Wicaka / B. B.
KELOMPOK	Kelompok Kerja KEMERDEKAAN
UNIT KERJA	Unit Kerja
2. PERALAMAN TERBUK	
NAMA	TERBUK KEMERDEKAAN
NIK	
PANGKAT/URUS BUKU	
KELOMPOK	di Kelompok Kerja KEMERDEKAAN
UNIT KERJA	Pengelolaan KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN
3. PERALAMAN PERALAMAN PERALAMAN	
NAMA	
NIK	
PANGKAT/URUS BUKU	
KELOMPOK	
UNIT KERJA	
4. PERALAMAN PERALAMAN	
KELOMPOK KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN	KEMERDEKAAN
PERALAMAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN	KEMERDEKAAN
5. PERALAMAN PERALAMAN	

Jakarta, 19 Januari 2021

T. Peralaman yang KEMERDEKAAN


di PERALAMAN TERBUK WICAKA, M.B.P.
1910000000000000000

Jakarta, 19 Januari 2021

T. Peralaman yang KEMERDEKAAN


TERBUK KEMERDEKAAN

**KUALITAS AIR (KUALITAS)
PENGARAHAN KUALITAS AIR (KUALITAS)**

PERIODE: Periode 1001 Tahun

PERIODE PERIODE (KUALITAS)

PERIODE PERIODE: 1 JANUARI 2011 - 31 DESEMBER 2011

KUALITAS AIR (KUALITAS)		KUALITAS AIR (KUALITAS)	
1. NAMA	2. NAMA	3. NAMA	4. NAMA
5. NAMA	6. NAMA	7. NAMA	8. NAMA
9. NAMA	10. NAMA	11. NAMA	12. NAMA
13. NAMA	14. NAMA	15. NAMA	16. NAMA
17. NAMA	18. NAMA	19. NAMA	20. NAMA
21. NAMA	22. NAMA	23. NAMA	24. NAMA
25. NAMA	26. NAMA	27. NAMA	28. NAMA
29. NAMA	30. NAMA	31. NAMA	32. NAMA

PERIODE PERIODE (KUALITAS)

PERIODE PERIODE

**KUALITAS AIR (KUALITAS)
KUALITAS AIR (KUALITAS)**



RENCANA KERJA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET	PERINGKAT	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA KUNCI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UTAMA						
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,13	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Komunitas (Kesehatan Masyarakat)	Kualitas Hidup (KHI)	1	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1
		Kualitas Hidup (KHI)	1	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Anggaran	Perentase realisasi anggaran	100 persen	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1
4	Meningkatnya Capaian Program Pengabdian Masyarakat (Pengabdian Masyarakat)	Perentase Realisasi (Pengabdian Masyarakat)	95%	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1
5	Meningkatnya Capaian Program Pengabdian Masyarakat (Pengabdian Masyarakat)	Perentase Realisasi (Pengabdian Masyarakat)	95%	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1
6	Meningkatnya Capaian Program Pengabdian Masyarakat (Pengabdian Masyarakat)	Perentase Realisasi (Pengabdian Masyarakat)	95%	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1
7	Meningkatnya Capaian Program Pengabdian Masyarakat (Pengabdian Masyarakat)	Angka Kesehatan (AK)	100 per 100.000 jiwa	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1
		Angka Kesehatan (AK)	100 per 100.000 jiwa	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1
		Angka Kesehatan (AK)	100 per 100.000 jiwa	Peringkat Layak	1.13 (Indeks Kesehatan Masyarakat) (Indeks Kesehatan Masyarakat)	Peringkat 1

1999

BATTERY POWER, KIDOLIN
 1994-1995, 1997-1998, 1999-2000

PESERTA KEGIATAN		LOKASI KEGIATAN BERKUALITAS PENGALAMAN KEGIATAN KUALITAS
Manajemen keuangan pribadi (MPP) Terdapat dalam buku yang akan disajikan oleh manajemen. Manajemen keuangan pribadi (MPP) adalah cara untuk mengelola keuangan.	Manajemen Keuangan Pribadi Manajemen keuangan pribadi (MPP) adalah cara untuk mengelola keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi (MPP) adalah cara untuk mengelola keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi (MPP) adalah cara untuk mengelola keuangan pribadi.	Manajemen - 1
KETERANGAN KEGIATAN		
KETERANGAN KEGIATAN		
KETERANGAN KEGIATAN		


 NAMA PESERTA KEGIATAN: NAMA PESERTA KEGIATAN
 NAMA PESERTA KEGIATAN


 NAMA ORGANISATOR KEGIATAN: NAMA ORGANISATOR KEGIATAN
 NAMA ORGANISATOR KEGIATAN

No	Indikator Program	Target	CAPAIAN	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%) Maks 110%	Bobot	Indeks
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	100/100000KH	108.73/100000KH	91,27%	91,27%	7%	0,06
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,6/1000KH	8,01/1000KH	79%	79%	7%	0,06
3	Angka Kematian Balita (Akbal)	1/1000KH	0,15/1000KH	110%	110%	7%	0,08
4	Universal health Coverage	98%	97,8%	99,79%	99,79%	7%	0,07
5	Prevalensi Stunting	9%	4,46%	110%	110%	7%	0,08
6	Persentase Kecamatan Sehat	33,33%	33,33%	100%	100%	6%	0,06
7	Persentase Desa UCI	88%	56,86%	65%	65%	6%	0,04
8	Angka Kesakitan Penyakit DM dan HT	50%	84,50%	110%	110%	7%	0,08

No	Indikator Program	Target	CAPAIAN	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%) Maks 110%	Bobot	Indeks
9	Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	80%	72,05%	90%	90%	6%	0,05
10	Persentase Rumah Tangga Sehat	50%	31,00%	62%	62%	7%	0,04
11	Persentase fasilitas kesehatan memenuhi standar	95%	95,00%	100%	100%	8%	0,08
12	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BHP di FKTP sesuai kebutuhan	94%	99,50%	106%	106%	6%	0,06
13	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	95%	95,50%	101%	101%	6%	0,06
14	Insiden Rate Penyakit Menular	1,25%	0,95%	110%	110%	7%	0,08
15	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Faskes Sesuai Standar	95%	99,97%	105%	105%	6%	0,06
IKKM TAHUN 2024							0,99

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang



dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP
NIP. 197106082002121006

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

- 1

NAMA

:

SYAIFUL ANWAR, ST
- 2

NIP

:

197803192005011015
- 3

PANGKAT/GOL. RUANG

:

Pembina / IV a
- 4

JABATAN

:

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
- 5

UNIT KERJA

:

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAN 1		TRIBUNAN 2		TRIBUNAN 3		TRIBUNAN 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Kali
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali
		Nilai IRB	2 Menetapkan tim SAKIP dan RB Dinas Kesehatan dalam SK Kepala Dinas	1 Dokumen	2 Menetapkan tim SAKIP dan RB Dinas Kesehatan dalam SK Kepala Dinas	1 Dokumen	2 Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali	2	
			3 Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali	3 Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali			3 Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja aparatu	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja aparatu	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja aparatu	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja aparatu	1 Kali
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali
4	Meningkatnya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali
5	Meningkatnya Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rumah tangga sehat	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rumah tangga sehat	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rumah tangga sehat	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rumah tangga sehat	1 Kali
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali
6	Meningkatnya Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Kali
							2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali		
		2. - Angka Kematian Bayi (AKB)	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali
							2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali		
		3. - Angka Kematian Balita	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAN 1		TRIBUNAN 2		TRIBUNAN 3		TRIBUNAN 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
		12. - Persentase Ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali
7	Meningkatnya Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali	2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	3 Kali
8	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	Persentase penyelesaian penugasan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditentukanAtasan Langsung	1 Melaksanakan penugasan delegatif dengan tanggung jawab	100%	1 Melaksanakan penugasan delegatif dengan tanggung jawab	100%	1 Melaksanakan penugasan delegatif dengan tanggung jawab	100%	1 Melaksanakan penugasan delegatif dengan tanggung jawab	100%

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNLAN 4 TAHUN 2024

1 NAMA : dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP
2 NIP : 197106082002121006
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda/IV c
4 JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan
5 UNIT KERJA : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Kali	1 Kali	100%	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan namun masih perlu penguatan di masing masing bidang dalam peningkatan capaian realisasi anggaran dan indikator kinerja	Optimalisasi koordinasi dan monev dengan bidang terkait dalam rangka peningkatan realisasi anggaran dan kinerja	- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
		Nilai IRB	2	Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pelaksanaan SAKIP dan RB Perangkat Daerah	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja aparatu	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
4	Meningkatnya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
5	Meningkatnya Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rumah tangga sehat	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
6	Meningkatnya Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
		2. - Angka Kematian Bayi (AKB)	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
		3. - Angka Kematian Balita	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
		4. - Prevalensi Stunting	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
		5. - Persentase kecamatan sehat	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
		6. - Universal Health Coverage (UHC)	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
		7. - Persentase Desa UCI	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
			2 Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
		8. - Insiden Rate Penyakit Menular	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG		
		9. - Tingkat kemandirian ODGJ Berat	2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa		
			1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa		
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa		
		10. - Insiden Rate Diabetes Mellitus dan Hipertensi	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa		
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa		
		11. - Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa		
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa		
		12. - Persentase Ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali	1 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa		
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa		
		7	Meningkatnya Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian penyedia farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	1 Kali			1 Kali	100%	- Laporan Realisasi Tribunal 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
			2	Memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja	2 Kali	2 Kali	100%			- Laporan Realisasi Tribulan 4 Tahun 2024 '- Rapat Rutin Hari Selasa
8	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	Persentase penyelesaian penugasan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditentukanAtasan Langsung	1	Melaksanakan penugasan delegatif dengan tanggung jawab	100%	100%	100%			Dokumentasi hasil kegiatan
RATA-RATA CAPAIAN							100%			

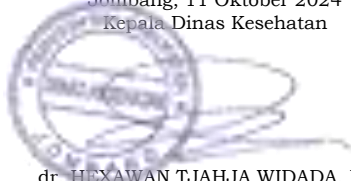


Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010

Jombang, 11 Oktober 2024

Kepala Dinas Kesehatan



dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP
NIP.197106082002121006

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	% SISA
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.301.725.200,00	1.858.222.950,00	80.73%	443.502.250,00	19.27%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.436.670.000,00	1.047.384.750,00	72.9%	389.285.250,00	27.1%
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.436.670.000,00	1.047.384.750,00	72.9%	389.285.250,00	27.1%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.700.000,00	41.700.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	91.200.000,00	62.100.000,00	68.09%	29.100.000,00	31.91%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.024.400.000,00	741.000.000,00	72.34%	283.400.000,00	27.66%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	24.000.000,00	80%	6.000.000,00	20%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	234.692.000,00	169.536.000,00	72.24%	65.156.000,00	27.76%
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.851.600,00	0,00	0%	1.851.600,00	100%
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.970.000,00	3.400.000,00	48.78%	3.570.000,00	51.22%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.805.000,00	2.805.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.051.400,00	2.843.750,00	93.19%	207.650,00	6.81%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	863.310.200,00	809.093.200,00	93.72%	54.217.000,00	6.28%
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.258.200,00	18.031.200,00	98.76%	227.000,00	1.24%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	9.492.500,00	99.92%	7.500,00	0.08%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.463.700,00	1.463.700,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.415.000,00	5.241.000,00	96.79%	174.000,00	3.21%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	934.000,00	934.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	945.500,00	900.000,00	95.19%	45.500,00	4.81%
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	117.852.000,00	116.212.000,00	98.61%	1.640.000,00	1.39%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.200.000,00	15.200.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	98.452.000,00	97.012.000,00	98.54%	1.440.000,00	1.46%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.600.000,00	88.89%	200.000,00	11.11%
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	727.200.000,00	674.850.000,00	92.8%	52.350.000,00	7.2%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	727.200.000,00	674.850.000,00	92.8%	52.350.000,00	7.2%
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.745.000,00	1.745.000,00	100%	0,00	0%
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.745.000,00	1.745.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.745.000,00	1.745.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	115.514.372.822,00	110.260.947.899,95	95.45%	5.253.424.922,05	4.55%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.736.800.316,00	78.939.536.080,05	97.77%	1.797.264.235,95	2.23%
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	116.080.000,00	113.991.380,00	98.2%	2.088.620,00	1.8%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.150.000,00	20.902.030,00	94.37%	1.247.970,00	5.63%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.302.500,00	30.737.000,00	98.19%	565.500,00	1.81%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000,00	36.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000,00	18.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.500.000,00	7.225.000,00	96.33%	275.000,00	3.67%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.127.500,00	1.127.350,00	99.99%	150,00	0.01%
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	35.937.600,00	35.750.500,00	99.48%	187.100,00	0.52%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.750.000,00	23.750.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.187.600,00	4.000.500,00	95.53%	187.100,00	4.47%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	290.262.500,00	262.821.630,00	90.55%	27.440.870,00	9.45%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.030.000,00	2.006.100,00	98.82%	23.900,00	1.18%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.170.000,00	6.937.000,00	96.75%	233.000,00	3.25%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	146.008.420,00	130.288.000,00	89.23%	15.720.420,00	10.77%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.037.500,00	4.037.500,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000,00	6.200.000,00	96.88%	200.000,00	3.12%
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	400.000,00	400.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.580,00	0,00	0%	16.580,00	100%
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	92.000.000,00	92%	8.000.000,00	8%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	750.000,00	500.000,00	66.67%	250.000,00	33.33%
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.000.000,00	700.000,00	23.33%	2.300.000,00	76.67%
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	6.500.000,00	5.853.030,00	90.05%	646.970,00	9.95%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	900.000,00	900.000,00	100%	0,00	0%

5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	3.050.000,00	3.000.000,00	98.36%	50.000,00	1.64%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100.823.200,00	100.702.000,00	99.88%	121.200,00	0.12%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.200.000,00	27.200.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.550.000,00	23.550.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.832.000,00	4.712.000,00	97.52%	120.000,00	2.48%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	241.200,00	240.000,00	99.5%	1.200,00	0.5%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.765.215.200,00	4.755.936.650,00	99.81%	9.278.550,00	0.19%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.048.200,00	18.604.650,00	92.8%	1.443.550,00	7.2%
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	31.200.000,00	31.200.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.850.000,00	17.850.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	1.525.000,00	1.500.000,00	98.36%	25.000,00	1.64%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.200.000,00	27.200.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	798.360.000,00	798.240.000,00	99.98%	120.000,00	0.02%
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.818.848.000,00	3.818.848.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	50.184.000,00	42.494.000,00	84.68%	7.690.000,00	15.32%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	77.607.000,00	61.440.000,00	79.17%	16.167.000,00	20.83%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.125.000,00	20.115.000,00	90.92%	2.010.000,00	9.08%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.500.000,00	14.300.000,00	86.67%	2.200.000,00	13.33%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.275.000,00	20.275.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.575.000,00	1.550.000,00	98.41%	25.000,00	1.59%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.200.000,00	1.600.000,00	19.51%	6.600.000,00	80.49%
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	8.932.000,00	3.600.000,00	40.3%	5.332.000,00	59.7%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	52.494.400.000,00	52.175.653.431,00	99.39%	318.746.569,00	0.61%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.000.000,00	90.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	5.879.867.050,00	5.756.659.019,00	97.9%	123.208.031,00	2.1%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.419.350,00	20.419.350,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	42.000.000.000,00	41.980.377.600,00	99.95%	19.622.400,00	0.05%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.160.000,00	10.697.462,00	95.86%	462.538,00	4.14%
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.481.153.600,00	4.305.700.000,00	96.08%	175.453.600,00	3.92%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	11.800.000,00	11.800.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	206.899.995,00	200.216.327,55	96.77%	6.683.667,45	3.23%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.708.514,00	17.687.636,00	99.88%	20.878,00	0.12%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000,00	5.600.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	4.347.500,00	99.94%	2.500,00	0.06%
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	43.800.000,00	39.000.000,00	89.04%	4.800.000,00	10.96%
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.335.000,00	1.120.000,00	83.9%	215.000,00	16.1%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	24.617.295,00	23.945.000,00	97.27%	672.295,00	2.73%
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	389.500,00	0,00	0%	389.500,00	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	4.005.000,00	4.000.000,00	99.88%	5.000,00	0.12%
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	36.955.200,00	36.800.000,00	99.58%	155.200,00	0.42%
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	44.500.000,00	44.495.465,55	99.99%	4.534,45	0.01%
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	13.890.000,00	13.500.000,00	97.19%	390.000,00	2.81%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	393.236,00	384.726,00	97.84%	8.510,00	2.16%
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.856.250,00	1.836.000,00	98.91%	20.250,00	1.09%
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	286.871.200,00	286.155.300,00	99.75%	715.900,00	0.25%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.692.900,00	34.089.000,00	98.26%	603.900,00	1.74%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.250.000,00	14.250.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	216.000.000,00	216.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.300.000,00	15.200.000,00	99.35%	100.000,00	0.65%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	384.000,00	372.000,00	96.88%	12.000,00	3.12%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	244.300,00	244.300,00	100%	0,00	0%

1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.538.667.355,00	12.464.625.095,00	92.07%	1.074.042.260,00	7.93%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.376.000,00	27.936.204,00	72.8%	10.439.796,00	27.2%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.500.000,00	38.800.000,00	89.2%	4.700.000,00	10.8%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114.712.500,00	92.400.000,00	80.55%	22.312.500,00	19.45%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	150.000.000,00	85.600.000,00	57.07%	64.400.000,00	42.93%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.248.754.135,00	7.906.702.395,00	95.85%	342.051.740,00	4.15%
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	164.720,00	0,00	0%	164.720,00	100%
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.943.160.000,00	4.313.186.496,00	87.26%	629.973.504,00	12.74%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	48.910.000,00	43.479.250,00	88.9%	5.430.750,00	11.1%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.900.000,00	22.900.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.250.000,00	1.450.000,00	64.44%	800.000,00	35.56%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.160.000,00	9.529.250,00	85.39%	1.630.750,00	14.61%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.600.000,00	9.600.000,00	76.19%	3.000.000,00	23.81%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.833.848.350,00	2.800.510.700,00	98.82%	33.337.650,00	1.18%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.951.000,00	25.361.000,00	97.73%	590.000,00	2.27%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.600.000,00	25.800.000,00	74.57%	8.800.000,00	25.43%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.600.750,00	195.200.750,00	92.69%	15.400.000,00	7.31%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	514.075.000,00	511.621.850,00	99.52%	2.453.150,00	0.48%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.120.246.700,00	1.119.078.800,00	99.9%	1.167.900,00	0.1%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.900.000,00	74.257.500,00	95.32%	3.642.500,00	4.68%
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	153.450.000,00	153.367.500,00	99.95%	82.500,00	0.05%
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	398.385.000,00	398.352.500,00	99.99%	32.500,00	0.01%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	190.678.900,00	189.765.800,00	99.52%	913.100,00	0.48%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	106.596.000,00	106.340.000,00	99.76%	256.000,00	0.24%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.365.000,00	1.365.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	241.848.800,00	236.346.952,00	97.73%	5.501.848,00	2.27%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.037.500,00	51.600.000,00	99.16%	437.500,00	0.84%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.721.500,00	10.095.750,00	94.16%	625.750,00	5.84%
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	22.286.800,00	19.359.192,00	86.86%	2.927.608,00	13.14%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	88.738.000,00	87.804.000,00	98.95%	934.000,00	1.05%
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	51.400.000,00	50.949.000,00	99.12%	451.000,00	0.88%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.225.000,00	5.225.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.840.000,00	7.714.010,00	98.39%	125.990,00	1.61%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	130.210.500,00	125.253.400,00	96.19%	4.957.100,00	3.81%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.200.000,00	62.400.000,00	92.86%	4.800.000,00	7.14%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.225.000,00	62.225.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	785.500,00	628.400,00	80%	157.100,00	20%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	109.820.000,00	101.765.490,00	92.67%	8.054.510,00	7.33%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.860.000,00	1.166.000,00	17%	5.694.000,00	83%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	5.600.000,00	72.73%	2.100.000,00	27.27%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	260.000,00	0,00	0%	260.000,00	100%
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	95.000.000,00	94.999.490,00	100%	510,00	0%
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	14.780.000,00	3.675.000,00	24.86%	11.105.000,00	75.14%
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	7.700.000,00	3.675.000,00	47.73%	4.025.000,00	52.27%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.080.000,00	0,00	0%	7.080.000,00	100%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	247.912.800,00	242.131.950,00	97.67%	5.780.850,00	2.33%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.250.000,00	33.245.000,00	99.98%	5.000,00	0.02%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000,00	15.000.000,00	93.75%	1.000.000,00	6.25%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	666.800,00	166.950,00	25.04%	499.850,00	74.96%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.000.000,00	101.670.000,00	96.83%	3.330.000,00	3.17%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.496.000,00	34.800.000,00	98.04%	696.000,00	1.96%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.000.000,00	4.750.000,00	95%	250.000,00	5%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.460.000,00	29.095.029,50	95.52%	1.364.970,50	4.48%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000,00	4.900.000,00	96.08%	200.000,00	3.92%

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.760.000,00	4.965.000,00	86.2%	795.000,00	13.8%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000,00	1.880.029,50	83.56%	369.970,50	16.44%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.550.000,00	8.550.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.600.000,00	5.600.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	62.964.850,00	56.632.510,00	89.94%	6.332.340,00	10.06%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.532.000,00	6.027.660,00	70.65%	2.504.340,00	29.35%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.250.000,00	21.450.000,00	84.95%	3.800.000,00	15.05%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	234.850,00	234.850,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.748.000,00	13.720.000,00	99.8%	28.000,00	0.2%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.800.000,00	6.400.000,00	94.12%	400.000,00	5.88%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.800.000,00	6.400.000,00	94.12%	400.000,00	5.88%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.285.000,00	32.616.150,00	95.13%	1.668.850,00	4.87%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.370.000,00	6.753.650,00	80.69%	1.616.350,00	19.31%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.312.500,00	8.312.500,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.402.500,00	14.350.000,00	99.64%	52.500,00	0.36%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000,00	500.000,00	33.33%	1.000.000,00	66.67%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	500.000,00	33.33%	1.000.000,00	66.67%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.295.925.400,00	2.271.652.750,00	98.94%	24.272.650,00	1.06%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.360.000,00	10.260.000,00	99.03%	100.000,00	0.97%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.700.000,00	11.500.000,00	98.29%	200.000,00	1.71%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.925.000,00	10.835.000,00	99.18%	90.000,00	0.82%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.020.440.900,00	2.000.469.750,00	99.01%	19.971.150,00	0.99%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.634.000,00	34.250.000,00	98.89%	384.000,00	1.11%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.377.500,00	25.850.000,00	87.99%	3.527.500,00	12.01%
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	79.920.000,00	79.920.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	98.568.000,00	98.568.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	42.175.666,00	40.349.000,00	95.67%	1.826.666,00	4.33%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.395.000,00	1.298.750,00	93.1%	96.250,00	6.9%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	4.800.000,00	88.89%	600.000,00	11.11%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.175.000,00	6.175.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	225.750,00	225.750,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.563.650,00	8.216.000,00	95.94%	347.650,00	4.06%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	18.916.266,00	18.133.500,00	95.86%	782.766,00	4.14%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	522.833.200,00	514.644.065,00	98.43%	8.189.135,00	1.57%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.083.200,00	12.240.000,00	93.56%	843.200,00	6.44%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.600.000,00	0,00	0%	5.600.000,00	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.000,00	0,00	0%	1.600.000,00	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	33.746.400,00	33.714.065,00	99.9%	32.335,00	0.1%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	465.953.600,00	465.840.000,00	99.98%	113.600,00	0.02%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.495.000,00	35.473.860,00	92.15%	3.021.140,00	7.85%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.220.000,00	5.711.360,00	79.1%	1.508.640,00	20.9%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.400.000,00	13.600.000,00	94.44%	800.000,00	5.56%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.875.000,00	16.162.500,00	95.78%	712.500,00	4.22%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	873.900.924,00	703.618.500,00	80.51%	170.282.424,00	19.49%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.800.000,00	9.600.000,00	38.71%	15.200.000,00	61.29%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.737.500,00	9.737.500,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.235.000,00	2.640.000,00	50.43%	2.595.000,00	49.57%
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	618.688.950,00	466.230.000,00	75.36%	152.458.950,00	24.64%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	211.183.474,00	211.155.000,00	99.99%	28.474,00	0.01%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.256.000,00	4.256.000,00	100%	0,00	0%

1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.537.500,00	17.737.500,00	78.7%	4.800.000,00	21.3%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.200.000,00	6.400.000,00	57.14%	4.800.000,00	42.86%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.162.500,00	11.162.500,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	175.000,00	175.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	746.202.676,00	729.401.260,00	97.75%	16.801.416,00	2.25%
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	628.587.960,00	617.280.000,00	98.2%	11.307.960,00	1.8%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.415.000,00	4.141.260,00	76.48%	1.273.740,00	23.52%
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	112.199.716,00	107.980.000,00	96.24%	4.219.716,00	3.76%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	37.488.000,00	27.670.000,00	73.81%	9.818.000,00	26.19%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.043.200,00	5.500.000,00	78.09%	1.543.200,00	21.91%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	569.800,00	0,00	0%	569.800,00	100%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.450.000,00	2.745.000,00	42.56%	3.705.000,00	57.44%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.125.000,00	15.125.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.700.000,00	1.700.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.600.000,00	2.600.000,00	39.39%	4.000.000,00	60.61%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	330.946.800,00	323.500.000,00	97.75%	7.446.800,00	2.25%
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	130.946.800,00	124.000.000,00	94.69%	6.946.800,00	5.31%
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	200.000.000,00	199.500.000,00	99.75%	500.000,00	0.25%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	150.190.800,00	139.790.400,00	93.08%	10.400.400,00	6.92%
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	150.190.800,00	139.790.400,00	93.08%	10.400.400,00	6.92%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.137.312.444,00	29.692.950.637,90	89.61%	3.444.361.806,10	10.39%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.349.561.160,00	10.768.457.408,09	94.88%	581.103.751,91	5.12%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.957.500,00	19.024.270,12	86.64%	2.933.229,88	13.36%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.800.000,00	40.200.000,00	98.53%	600.000,00	1.47%
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.318.375.200,00	5.818.456.086,97	92.09%	499.919.113,03	7.91%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	47.965.234,00	47.960.300,00	99.99%	4.934,00	0.01%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.603.356.220,00	4.568.970.854,00	99.25%	34.385.366,00	0.75%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.000.250,00	2.000.250,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	142.333.500,00	122.942.000,00	86.38%	19.391.500,00	13.62%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.855.160,00	7.849.920,00	99.93%	5.240,00	0.07%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.000.000,00	12.600.000,00	96.92%	400.000,00	3.08%
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.250.000,00	2.525.000,00	77.69%	725.000,00	22.31%
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	38.128.000,00	16.634.982,00	43.63%	21.493.018,00	56.37%
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	8.082.000,00	7.990.000,00	98.86%	92.000,00	1.14%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.136.000,00	16.800.000,00	98.04%	336.000,00	1.96%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	45.110.896,00	45.049.995,00	99.86%	60.901,00	0.14%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	39.000.000,00	38.628.000,00	99.05%	372.000,00	0.95%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.211.200,00	825.750,00	68.18%	385.450,00	31.82%
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	132.000.000,00	132.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	132.000.000,00	132.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0%	0,00	100%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.331.195.320,00	6.926.098.177,00	94.47%	405.097.143,00	5.53%
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.634.213.360,00	3.411.931.477,00	93.88%	222.281.883,00	6.12%
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	11.773.400,00	10.478.700,00	89%	1.294.700,00	11%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.501.500,00	1.248.000,00	83.12%	253.500,00	16.88%
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	64.165.100,00	53.340.000,00	83.13%	10.825.100,00	16.87%
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	155.000.000,00	146.000.000,00	94.19%	9.000.000,00	5.81%
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.750.000,00	3.750.000,00	100%	0,00	0%
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	5.150.000,00	5.000.000,00	97.09%	150.000,00	2.91%
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.600.000.000,00	2.449.650.000,00	94.22%	150.350.000,00	5.78%
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	155.400.000,00	155.400.000,00	100%	0,00	0%
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	216.083.400,00	209.800.000,00	97.09%	6.283.400,00	2.91%
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	362.500.000,00	358.000.000,00	98.76%	4.500.000,00	1.24%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	121.658.560,00	121.500.000,00	99.87%	158.560,00	0.13%
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	521.640.000,00	520.148.295,00	99.71%	1.491.705,00	0.29%
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	521.640.000,00	520.148.295,00	99.71%	1.491.705,00	0.29%
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	13.587.433.814,00	11.152.032.304,81	82.08%	2.435.401.509,19	17.92%

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.000.000,00	45.000.000,00	100%	0,00	0%
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.190.433.814,00	10.757.040.351,67	81.55%	2.433.393.462,33	18.45%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.000,00	19.000.000,00	100%	0,00	0%
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	333.000.000,00	330.991.953,14	99.4%	2.008.046,86	0.6%
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	97.348.000,00	89.740.000,00	92.18%	7.608.000,00	7.82%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.400.000,00	32.400.000,00	100%	0,00	0%
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	108.000,00	0,00	0%	108.000,00	100%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.680.000,00	6.680.000,00	62.55%	4.000.000,00	37.45%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.130.000,00	5.130.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	100%	0,00	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.830.000,00	5.830.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	36.500.000,00	91.25%	3.500.000,00	8.75%
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	78.439.750,00	66.608.500,00	84.92%	11.831.250,00	15.08%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.214.000,00	19.437.600,00	64.33%	10.776.400,00	35.67%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.750,00	0,00	0%	750.750,00	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.475.000,00	2.468.400,00	99.73%	6.600,00	0.27%
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	45.000.000,00	44.702.500,00	99.34%	297.500,00	0.66%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39.694.400,00	37.865.953,00	95.39%	1.828.447,00	4.61%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.774.400,00	12.445.953,00	90.36%	1.328.447,00	9.64%
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	25.920.000,00	25.420.000,00	98.07%	500.000,00	1.93%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.085.227.400,00	1.079.221.682,00	99.45%	6.005.718,00	0.55%
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	21.227.400,00	19.972.500,00	94.09%	1.254.900,00	5.91%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.987.500,00	4.987.500,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.010.050,00	4.357.000,00	86.97%	653.050,00	13.03%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	10.500.000,00	95.45%	500.000,00	4.55%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	101.850,00	0,00	0%	101.850,00	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	128.000,00	128.000,00	100%	0,00	0%
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	64.000.000,00	59.249.182,00	92.58%	4.750.818,00	7.42%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.005.000,00	1.895.000,00	94.51%	110.000,00	5.49%
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.464.000,00	3.050.000,00	88.05%	414.000,00	11.95%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.000.000,00	13.900.000,00	99.29%	100.000,00	0.71%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.824.000,00	8.880.182,00	82.04%	1.943.818,00	17.96%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.304.400,00	0,00	0%	1.304.400,00	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.479.600,00	1.125.000,00	76.03%	354.600,00	23.97%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.275.000,00	4.275.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	128.000,00	124.000,00	96.88%	4.000,00	3.12%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.520.000,00	26.000.000,00	98.04%	520.000,00	1.96%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	555.032.662,00	549.239.500,00	98.96%	5.793.162,00	1.04%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	555.032.662,00	549.239.500,00	98.96%	5.793.162,00	1.04%
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31.500.000,00	31.500.000,00	100%	0,00	0%
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.400.000,00	9.070.000,00	87.21%	1.330.000,00	12.79%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.092.750,00	39.911.500,00	99.55%	181.250,00	0.45%
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	49.728.000,00	99.46%	272.000,00	0.54%
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	171.000.000,00	168.450.000,00	98.51%	2.550.000,00	1.49%
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	149.102.712,00	148.500.000,00	99.6%	602.712,00	0.4%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.337.200,00	5.985.000,00	94.44%	352.200,00	5.56%
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	96.500.000,00	96.015.000,00	99.5%	485.000,00	0.5%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	80.000,00	80%	20.000,00	20%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.616.277.880,00	90.064.034.416,43	92.26%	7.552.243.463,57	7.74%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.820.802.716,00	86.433.419.902,00	92.13%	7.387.382.814,00	7.87%
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.576.517.200,00	2.334.575.029,00	90.61%	241.942.171,00	9.39%
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	18.360.000,00	12.380.205,00	67.43%	5.979.795,00	32.57%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	805.900.000,00	753.000.000,00	93.44%	52.900.000,00	6.56%
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	291.720.000,00	174.965.076,00	59.98%	116.754.924,00	40.02%

5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.280.000,00	9.904.020,00	69.36%	4.375.980,00	30.64%
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	691.200.000,00	669.600.000,00	96.88%	21.600.000,00	3.12%
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100%	0,00	0%
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	279.720.000,00	248.676.000,00	88.9%	31.044.000,00	11.1%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.600.000,00	12.600.000,00	100%	0,00	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	15.640.000,00	95.83%	680.000,00	4.17%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	617.200,00	0,00	0%	617.200,00	100%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	437.400.000,00	435.409.728,00	99.54%	1.990.272,00	0.46%
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	6.000.000,00	0,00	0%	6.000.000,00	100%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.115.965.516,00	83.976.664.873,00	92.16%	7.139.300.643,00	7.84%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.011.280.132,00	4.869.846.176,00	97.18%	141.433.956,00	2.82%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.651.993.500,00	5.519.604.750,00	97.66%	132.388.750,00	2.34%
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	395.940.659,00	324.460.563,00	81.95%	71.480.096,00	18.05%
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	132.321.873,00	118.077.180,00	89.23%	14.244.693,00	10.77%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	133.745,00	131.779,00	98.53%	1.966,00	1.47%
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	60.848.826.066,00	57.488.652.302,00	94.48%	3.360.173.764,00	5.52%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	807.805,00	795.683,00	98.5%	12.122,00	1.5%
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	17.266.016,00	12.542.679,00	72.64%	4.723.337,00	27.36%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189.850.500,00	189.388.550,00	99.76%	461.950,00	0.24%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	430.280.000,00	300.540.000,00	69.85%	129.740.000,00	30.15%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.439.319.911,00	5.974.709.997,00	70.8%	2.464.609.914,00	29.2%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	572.006.125,00	363.990.000,00	63.63%	208.016.125,00	36.37%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	481.580.459,00	471.602.358,00	97.93%	9.978.101,00	2.07%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.005.592.945,00	2.920.696.689,00	97.18%	84.896.256,00	2.82%
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	51.798.969,00	37.627.680,00	72.64%	14.171.289,00	27.36%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	141.115.436,00	138.879.048,00	98.42%	2.236.388,00	1.58%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	363.432.528,00	355.292.520,00	97.76%	8.140.008,00	2.24%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.400.585.333,00	1.281.421.417,00	91.49%	119.163.916,00	8.51%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.098.914.061,00	1.001.065.967,00	91.1%	97.848.094,00	8.9%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.859.719.209,00	2.607.339.535,00	91.17%	252.379.674,00	8.83%
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12.812.075,00	0,00	0%	12.812.075,00	100%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10.388.169,00	0,00	0%	10.388.169,00	100%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	128.320.000,00	122.180.000,00	95.22%	6.140.000,00	4.78%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.720.000,00	9.720.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.400.000,00	22.400.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	5.060.000,00	93.7%	340.000,00	6.3%
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	90.800.000,00	85.000.000,00	93.61%	5.800.000,00	6.39%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.013.636,00	916.785.388,00	92.98%	69.228.248,00	7.02%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	454.130.091,00	388.385.158,00	85.52%	65.744.933,00	14.48%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	354.000.000,00	292.943.968,00	82.75%	61.056.032,00	17.25%
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	42.000.000,00	38.967.912,00	92.78%	3.032.088,00	7.22%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.180.091,00	15.523.278,00	90.36%	1.656.813,00	9.64%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	40.950.000,00	40.950.000,00	100%	0,00	0%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	531.883.545,00	528.400.230,00	99.35%	3.483.315,00	0.65%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	531.883.545,00	528.400.230,00	99.35%	3.483.315,00	0.65%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.102.446.682,00	1.088.789.178,43	98.76%	13.657.503,57	1.24%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	552.737.900,00	539.931.208,90	97.68%	12.806.691,10	2.32%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	39.750.000,00	26.962.400,00	67.83%	12.787.600,00	32.17%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.594.000,00	15.594.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	47.450.000,00	47.435.000,00	99.97%	15.000,00	0.03%
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	449.943.900,00	449.939.808,90	100%	4.091,10	0%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.710.000,00	153.655.000,00	99.96%	55.000,00	0.04%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	66.300.000,00	66.280.000,00	99.97%	20.000,00	0.03%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.500.000,00	36.480.000,00	99.95%	20.000,00	0.05%
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	16.190.000,00	16.190.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	33.120.000,00	33.105.000,00	99.95%	15.000,00	0.05%
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.600.000,00	1.600.000,00	100%	0,00	0%

1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.998.782,00	395.202.969,53	99.8%	795.812,47	0.2%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	160.000.090,00	159.209.400,00	99.51%	790.690,00	0.49%
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	235.998.692,00	235.993.569,53	100%	5.122,47	0%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.126.771.221,00	1.063.697.354,00	94.4%	63.073.867,00	5.6%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.221.440,00	4.495.000,00	86.09%	726.440,00	13.91%
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.221.440,00	4.495.000,00	86.09%	726.440,00	13.91%
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.975.862,00	280.505.000,00	87.39%	40.470.862,00	12.61%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.912.500,00	53.895.000,00	99.97%	17.500,00	0.03%
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	264.000.000,00	226.610.000,00	85.84%	37.390.000,00	14.16%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.063.362,00	0,00	0%	3.063.362,00	100%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.395.000,00	315.770.504,00	99.49%	1.624.496,00	0.51%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	188.695.000,00	187.336.954,00	99.28%	1.358.046,00	0.72%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	128.700.000,00	128.433.550,00	99.79%	266.450,00	0.21%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.319.825,00	19.919.750,00	89.25%	2.400.075,00	10.75%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.237.825,00	12.237.750,00	100%	75,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.082.000,00	7.682.000,00	76.2%	2.400.000,00	23.8%
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	303.846.994,00	292.423.000,00	96.24%	11.423.994,00	3.76%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	298.681.344,00	288.000.000,00	96.42%	10.681.344,00	3.58%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.016.400,00	3.500.500,00	87.16%	515.900,00	12.84%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.149.250,00	922.500,00	80.27%	226.750,00	19.73%
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.571.200,00	139.184.100,00	96.27%	5.387.100,00	3.73%
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	349.800,00	0,00	0%	349.800,00	100%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.085.400,00	13.081.000,00	99.97%	4.400,00	0.03%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	92.162.700,00	87.298.700,00	94.72%	4.864.000,00	5.28%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.973.300,00	38.804.400,00	99.57%	168.900,00	0.43%
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.440.900,00	11.400.000,00	91.63%	1.040.900,00	8.37%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.440.900,00	11.400.000,00	91.63%	1.040.900,00	8.37%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.655.300,00	73.583.150,00	98.56%	1.072.150,00	1.44%
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.895.000,00	25.873.400,00	99.92%	21.600,00	0.08%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.795.000,00	8.773.400,00	99.75%	21.600,00	0.25%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.100.000,00	17.100.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0%	0,00	100%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.760.300,00	47.709.750,00	97.85%	1.050.550,00	2.15%
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	25.800.000,00	24.800.000,00	96.12%	1.000.000,00	3.88%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.680.000,00	10.629.450,00	99.53%	50.550,00	0.47%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.875.000,00	11.875.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	405.300,00	405.300,00	100%	0,00	0%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	452.188.325,00	439.564.444,00	97.21%	12.623.881,00	2.79%
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	452.188.325,00	439.564.444,00	97.21%	12.623.881,00	2.79%
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.054.400,00	3.040.000,00	99.53%	14.400,00	0.47%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	230.202.604,00	225.370.000,00	97.9%	4.832.604,00	2.1%
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	31.689.798,00	28.690.000,00	90.53%	2.999.798,00	9.47%
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.746.444,00	19.746.444,00	100%	0,00	0%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	60.333.400,00	60.310.000,00	99.96%	23.400,00	0.04%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.337.000,00	4.300.000,00	99.15%	37.000,00	0.85%
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	29.725.000,00	29.713.000,00	99.96%	12.000,00	0.04%
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.974.690,00	1.775.000,00	89.89%	199.690,00	10.11%
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.093.122,00	3.500.000,00	49.34%	3.593.122,00	50.66%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	53.441.067,00	52.600.000,00	98.43%	841.067,00	1.57%
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.214.000,00	2.200.000,00	99.37%	14.000,00	0.63%
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.376.800,00	8.320.000,00	99.32%	56.800,00	0.68%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.400.000,00	48.195.000,00	90.25%	5.205.000,00	9.75%
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.400.000,00	48.195.000,00	90.25%	5.205.000,00	9.75%
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	53.400.000,00	48.195.000,00	90.25%	5.205.000,00	9.75%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	293.945.000,00	271.874.200,00	92.49%	22.070.800,00	7.51%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.072.100,00	123.124.100,00	91.15%	11.948.000,00	8.85%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	135.072.100,00	123.124.100,00	91.15%	11.948.000,00	8.85%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.612.500,00	40.612.500,00	100%	0,00	0%

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.400.000,00	34.200.000,00	99.42%	200.000,00	0.58%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.600.000,00	10.000.000,00	56.82%	7.600.000,00	43.18%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.383.100,00	3.383.100,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.805.500,00	2.417.500,00	86.17%	388.000,00	13.83%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.812.000,00	3.707.000,00	63.78%	2.105.000,00	36.22%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	459.000,00	304.000,00	66.23%	155.000,00	33.77%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	30.000.000,00	28.500.000,00	95%	1.500.000,00	5%
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.506.400,00	113.073.700,00	92.3%	9.432.700,00	7.7%
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	122.506.400,00	113.073.700,00	92.3%	9.432.700,00	7.7%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.080.000,00	3.973.000,00	78.21%	1.107.000,00	21.79%
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	14.500.000,00	72.5%	5.500.000,00	27.5%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.612.500,00	16.612.500,00	100%	0,00	0%
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.500.000,00	6.500.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.000.000,00	20.250.000,00	92.05%	1.750.000,00	7.95%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0%	0,00	100%
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.300.000,00	10.300.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.704.000,00	25.200.000,00	98.04%	504.000,00	1.96%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.437.600,00	6.276.000,00	97.49%	161.600,00	2.51%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.800,00	14.700,00	99.32%	100,00	0.68%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.457.500,00	1.047.500,00	71.87%	410.000,00	28.13%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.366.500,00	35.676.400,00	98.1%	690.100,00	1.9%
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36.366.500,00	35.676.400,00	98.1%	690.100,00	1.9%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	8.100.000,00	96.43%	300.000,00	3.57%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.535.000,00	12.510.000,00	99.8%	25.000,00	0.2%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00	4.800.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.100.000,00	5.100.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	421.500,00	421.400,00	99.98%	100,00	0.02%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.110.000,00	4.745.000,00	92.86%	365.000,00	7.14%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	104.697.050,00	96.120.200,00	91.81%	8.576.850,00	8.19%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	47.883.000,00	47.883.000,00	100%	0,00	0%
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	47.883.000,00	47.883.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	37.840.000,00	37.840.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.043.000,00	10.043.000,00	100%	0,00	0%
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	17.471.750,00	9.310.000,00	53.29%	8.161.750,00	46.71%
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	17.471.750,00	9.310.000,00	53.29%	8.161.750,00	46.71%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.310.000,00	9.310.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	0,00	0%	3.000.000,00	100%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.361.750,00	0,00	0%	3.361.750,00	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	0,00	0%	1.800.000,00	100%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13.460.500,00	13.460.500,00	100%	0,00	0%
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13.460.500,00	13.460.500,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	13.460.500,00	13.460.500,00	100%	0,00	0%
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	800.000,00	800.000,00	100%	0,00	0%
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	800.000,00	800.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	800.000,00	100%	0,00	0%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	21.095.100,00	20.680.000,00	98.03%	415.100,00	1.97%
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	21.095.100,00	20.680.000,00	98.03%	415.100,00	1.97%
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	19.050.000,00	19.050.000,00	100%	0,00	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.045.100,00	1.630.000,00	79.7%	415.100,00	20.3%
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.986.700,00	3.986.700,00	100%	0,00	0%
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.986.700,00	3.986.700,00	100%	0,00	0%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.986.700,00	3.986.700,00	100%	0,00	0%

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Jombang
Periode Pelaksanaan :2024

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun		Permasalahan	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= (13/8)x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata rata capaian kinerja aparatur	Persen	0	0	100	83.701.685.235	100	97.616.277.880	33.47	23.958.003.322	55.67	50.173.299.922	78.84	69.428.657.626	81.1	90.064.034.416	81.1	90.064.034.416	81.1	92.26	181.1	173.765.719.651	100	100		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	0	0	100	80.786.745.263	100	93.820.802.716	62.5	23.242.768.083	81.25	48.694.336.403	81.25	67.392.790.514	100	86.433.419.902	100	86.433.419.902	100	92.13	200	170.850.779.679	100	100		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			0	0	1221	91.115.965.516	1203	22.647.743.956	1267	47.519.846.142	1254	65.636.736.619	1264	83.976.664.873	1264	83.976.664.873	100	92.16	1264	90.064.034.416	100	100	Jumlah sesuai realisasi pegawai yang ada	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			0	0	1	2.576.517.200	1	594.254.127	1	1.171.427.761	1	1.744.301.395	1	2.334.575.029	1	2.334.575.029	100	90.61	1	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD	Laporan			0	0	1	128.320.000	1	770.000	1	3.062.500	1	11.752.500	1	122.180.000	1	122.180.000	100	95.22	1	90.064.034.416	100	100		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	53.400.000	0	0	0	0	100	48.195.000	100	48.195.000	100	48.195.000	100	90.25	100	90.064.034.416	100	100		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			0	0	89	53.400.000	0	0	0	89	48.195.000	89	48.195.000	89	48.195.000	89	48.195.000	100	90.25	89	90.064.034.416	100	100	Target tercapai
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	0	0	100	642.756.278	100	1.102.446.682	36.21	298.041.900	74.14	464.407.000	91.38	625.487.418	100	1.088.789.178	100	1.088.789.178	100	98.76	200	90.706.790.694	100	100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			0	0	55	552.737.900	19	95.772.500	40	215.662.600	50	352.538.018	55	539.931.209	55	539.931.209	100	97.68	55	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar ra/Direhabilitasi	Unit			0	0	1	395.998.782	1	159.209.400	1	159.209.400	1	159.209.400	1	395.202.970	1	395.202.970	100	99.8	1	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharara/Direh abilitasi	Unit			0	0	2	153.710.000	1	43.060.000	2	89.535.000	2	113.740.000	2	153.655.000	2	153.655.000	100	99.96	2	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	0	0	100	315.732.094	100	986.013.636	6.52	78.132.920	13.04	162.120.134	19.57	247.004.358	47.83	916.785.388	47.83	916.785.388	47.83	92.98	147.83	90.379.766.510	100	100		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			0	0	12	454.130.091	3	78.132.920	6	162.120.134	9	247.004.358	12	388.385.158	12	388.385.158	100	85.52	12	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0	0	34	531.883.545	0	0	0	0	0	0	10	528.400.230	10	528.400.230	29.41	99.35	10	90.064.034.416	100	100	Ada perubahan biaya yang berdampak pada pengurangan volume	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	0	0	100	1.272.713.040	100	1.126.771.221	42.16	195.980.119	69.61	555.276.135	87.25	799.430.086	100	1.063.697.354	100	1.063.697.354	100	94.4	200	91.336.747.456	100	100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			0	0	1	12.440.900	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	100	91.63	1	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			0	0	48	144.571.200	28	0	42	111.208.100	48	124.289.100	48	139.184.100	48	139.184.100	100	96.27	48	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0	0	3	303.846.994	1	76.423.000	2	124.423.000	2	220.423.000	3	292.423.000	3	292.423.000	100	96.24	3	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0	0	1	320.975.862	1	34.657.500	1	101.955.000	1	186.077.500	1	280.505.000	1	280.505.000	100	87.39	1	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0	0	1	22.319.825	0	0	1	11.583.800	1	15.485.600	1	19.919.750	1	19.919.750	100	89.25	1	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			0	0	36	5.221.440	9	1.440.000	18	2.455.000	27	3.475.000	36	4.495.000	36	4.495.000	100	86.09	36	90.064.034.416	100	100	Target tercapai	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			0	0	121	317.395.000	3	72.059.619	5	192.251.235	9	238.279.886	12	315.770.504	12	315.770.504	9.92	99.49	12	90.064.034.416	100	100	Terdapat kesahana penulisan target yang seharusnya 12 laporan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persen	0	0	8	81.537.400	100	74.655.300	25	5.155.300	37.5	30.542.250	75	30.542.250	100	73.583.150	100	73.583.150	100	98.56	108	90.145.571.816	100	100		

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun		Permasalahan
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= (13/8)x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			0	0	5	48.760.300	1	5.155.300	1	15.243.500	3	15.243.500	3	47.709.750	3	47.709.750	60	97.85	3	90.064.034.416	100	100	1. Renja Tahun 2024 2. Renja Perubahan Tahun 2024 3. Renja Tahun 2025
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			0	0	5	25.895.000	1	0	2	15.298.750	3	15.298.750	5	25.873.400	5	25.873.400	100	99.92	5	90.064.034.416	100	100	1. Laporan Realisasi TW 1 2. Laporan Realisasi TW 2 3. Laporan Realisasi TW 3 4. Laporan Realisas TW 4 5. Laporan Tahunan (LKJIIP)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persen	0	0	100	602.201.160	100	452.188.325	32.91	137.925.000	88.61	266.618.000	88.61	285.208.000	100	439.564.444	100	439.564.444	100	97.21	200	90.666.235.576	100	100	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			0	0	79	452.188.325	26	137.925.000	70	266.618.000	70	285.208.000	79	439.564.444	79	439.564.444	100	97.21	79	90.064.034.416	100	100	Target tercapai
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar	Persen	61.54	151.744.746.624	0.27	124.432.365.912	60	115.514.372.822	81.3	14.834.955.632	84.3	38.653.708.089	84.3	71.941.666.997	95	110.260.947.900	95	110.260.947.900	100	95.45	95.27	234.693.313.812	100	100	Target tercapai
			Angka kematian Balita (AKBAL)	KH					1 /1.000		0.22		0.2		0.1		0.148/1.000		0.148/1.000		14.8	0.148				Target tercapai	
			Angka kematian Bayi (AKB)	KH					6.6 /1.000		2.12		3.9		6.1		8.006/1.000		8.006/1.000		100	8.006				Target tidak tercapai	
			Angka Kematian Ibu	KH					100 /100.000		44.66		44.66		63.9		108.73/100.000		108.73/100.000		100	108.73				Target tidak tercapai	
			Insiden Rate Diabetes Mellitus dan Hipertensi	Persen					50		20.49		31.04		60.32		84.5		84.5		100	84.5				Target tercapai	
			Insiden Rate Penyakit Menular	Persen					1.25		0.26		0.55		0.81		0.95		0.95		76	0.95				Target tercapai	
			Persentase Desa UCI	Persen					88		12		41.6		55.56		56.86		56.86		64.61	56.86				Ketersediaan vaksin beberapa kali kosong sehingga capaian IDL turun dan berpengaruh kepada capaian desa UCI, sasaran proyeksi lebih tinggi dibandingkan sasaran riil, distribusi sasaran proyeksi dibanding distribusi sasaran riil tidak selaras	
			Persentase kecamatan sehat	Persen					33.33		0		0		33.33		33.33		33.33		100	33.33				Target tercapai	
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar	Persen					92		95.69		95.62		96.28		99.5		99.5		100	99.5				Target tercapai	
			Prevalensi Stunting	Persen					9		5.7		5.88		4.86		4.46		4.46		49.56	4.46				Target tercapai	
			Tingkat Kemandirian ODGJ Berat	Persen					80		27.98		65.01		60.43		72.05		72.05		90.06	72.05				Target tidak tercapai	
			Universal Health Coverage (UHC)	Persen					90		96.83		97.35		98.10		97.79		97.79		100	97.79				Realisasai lebih rendah dibanding TW sebelumnya karena adanya penambahan jumlah penduduk	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Yang Berizin	Persen	100	212.734.044	100	1.300.612.910	100	1.085.227.400	100	634.156.500	100	673.459.182	100	1.078.750.682	100	1.079.221.682	100	1.079.221.682	100	99.45	200	111.561.560.810	100	100	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	Unit			0	0	102	21.227.400	99	12.987.500	99	14.210.000	100	19.501.500	102	19.972.500	102	19.972.500	100	94.09	102	110.260.947.900	100	100	

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun		Permasalahan
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= (13/8)x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya																								
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit			0	0	102	1.000.000.000	99	600.000.000	99	600.000.000	101	1.000.000.000	99	1.000.000.000	99	1.000.000.000	97.06	100	99	110.260.947.900	99	100	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit			0	0	102	64.000.000	0	21.169.000	99	59.249.182	15	59.249.182	22	59.249.182	22	59.249.182	21.57	92.58	22	110.260.947.900	22	100	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi yang dikelola sesuai prosedur	Persen	100	246.356.000	1	417.386.000	100	760.257.712	100	6.993.000	100	259.879.544	100	497.530.040	100	578.225.438	100	578.225.438	100	76.06	101	110.678.333.900	100	100	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen			0	0	1	555.032.662	1	6.993.000	1	258.501.000	1	483.995.500	1	549.239.500	1	549.239.500	100	98.96	1	110.260.947.900	1	100	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas sesuai standar	Persen	98	26.796.523.480	96	37.801.404.056	90	33.137.312.444	95.69	2.689.881.141	95.62	8.222.346.695	96.28	16.534.086.606	99.5	29.692.950.638	99.5	29.692.950.638	100	89.61	195.5	148.062.351.956	100	100	
			Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Persen					100		95.69		95.62		100		100		100								
			Persentase ketersediaan prasarasana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Persen					100		0		0		0		100		100								
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Dibangun	Unit			0	0	1	521.640.000	0	0	0	0	29.301.225	1	520.148.295	1	520.148.295	100	99.71	1	110.260.947.900	1.02	100	Target tercapai	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit			0	0	4	13.587.433.814	0	156.365.256	0	246.837.683	0	2.337.545.561	4	11.152.032.305	4	11.152.032.305	100	82.08	4	110.260.947.900	4.08	100	Target tercapai
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit			0	0	3	7.331.195.320	0	0	0	3.624.402.177	3	6.043.138.177	3	6.926.098.177	3	6.926.098.177	100	94.47	3	110.260.947.900	3.06	100	Target tercapai
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit			0	0	15	78.439.750	0	0	0	12	0	15	66.608.500	15	66.608.500	100	84.92	15	110.260.947.900	15.31	100	Target tercapai	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit			0	0	12	39.694.400	0	0	0	12	37.865.953	12	37.865.953	12	37.865.953	100	95.39	12	110.260.947.900	12.24	100	Target tercapai	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket			0	0	1	11.349.561.160	0	2.498.715.885	0	4.285.506.835	1	7.954.305.690	1	10.768.457.408	1	10.768.457.408	100	94.88	1	110.260.947.900	1.02	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga			0	0	22582	97.348.000	0	0	109175	0	54348	28.730.000	99414	89.740.000	99414	89.740.000	100	92.18	99414	110.260.947.900	100	100	Realisasi melebihi target
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket			0	0	34	132.000.000	34	34.800.000	34	65.600.000	34	103.200.000	34	132.000.000	34	132.000.000	100	100	34	110.260.947.900	34.69	100	Target tercapai
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan sehat	Kecamatan	7056.77	48.380.508.402	100	84.912.962.946	7	189.418.287.828	1	27.453.953.852	0	69.645.148.817	7	121.235.358.415	7	176.199.126.135	7	176.199.126.135	100	93.02	106.5	195.173.910.846	1.51	100	
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Persen					67		81.3		84.3		84.3		95		95								
			Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan sesuai standart	Persen					100		17.59		45.02		50.02		70.92		70.92								
			Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standart	Persen					100		18.27		37.03		50.27		70.28		70.28								
			Persentase Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi	Persen					25		0		31.3		31.3		28.55		28.55								

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun		Permasalahan
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= (13/8)x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
			Masalah Kesehatannya oleh Tenaga																								
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen				100		57.27		76.08		92.68		105.8		105.8									
			Persentase Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar	Persen				100		28.6		56.3		102		144.5		144.5									
			Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	Persen				100		29.13		43.70		74.89		98.7		98.7									
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen				100		6		35		71.30		92.62		92.62									
			Persentase Penderita Terduga TB yang mendapat Pelayanan sesuai standar	Persen				100		36.81		64.2		99		131.7		131.7									
			Persentase penderita penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen				100		57.14		71.43		71.43		71.43		71.43									
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen				100		19.68		29.86		58.96		83.2		83.2									
			Persentase Penduduk Usia Produktif (> 15 tahun) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen				100		24.61		37.84		72.04		776383		776383									
			Persentase puskesmas dan RS Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	Persen				50		71.43		71.43		100		97.22		97.22									
			Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sesuai standar	Persen				100		100		100		100		100		100									
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen				100		18.29		43.51		51.69		76.38		76.38									
			Persentase Balita yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persen				100		20.32		33.57		53.67		81.85		81.85									
			Persentase balita stunting yang mendapat pelayanan sesuai standart	Persen				100		100		100		100		100		100									
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan sesuai standart	Persen				100		90		68.4		100		100		100									
			Jumlah Sampel yang diperiksa sesuai standar	Sampel				1564		311		789		1331		3142		3142									
			Jumlah penduduk yang mempunyai asuransi kesehatan	Orang				1296536		1321505		1328547		1344490		1344205		1344205									
			Persentasebayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen				86		13.69		39.6		65.64		84.36		84.36									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0	0	19811	38.495.000	3952	10.445.000	8432	23.582.500	10145	28.040.000	15059	35.473.860	15059	35.473.860	76.01	92.15	15059	110.260.947.900	100	100	Target tidak tercapai karena perbdaan jumlah sasaran (SUPAS dan Riil)	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0	0	18911	746.202.676	3785	1.364.250	7821	1.364.250	10540	378.544.250	15194	729.401.260	15194	729.401.260	80.34	97.75	15194	110.260.947.900	100	100	Target tidak tercapai karena perbdaan jumlah sasaran (SUPAS dan Riil)	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0	0	18010	873.900.924	3717	1.170.000	7601	1.580.000	10458	224.382.500	15259	703.618.500	15259	703.618.500	84.73	80.51	15259	110.260.947.900	100	100	Target tidak tercapai karena perbdaan jumlah sasaran (SUPAS dan Riil)	

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun		Permasalahan	
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= (13/8)x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			0	0	130313	22.537.500	20165	0	36373	0	52380	17.562.500	65090	17.737.500	65090	17.737.500	49.95	78.7	65090	110.260.947.900	100	100	Target tidak tercapai karena perbdaan jumlah sasaran (SUPAS dan Riil)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			0	0	163168	109.820.000	74173	0	126223	1.866.000	126223	3.266.000	163168	101.765.490	163168	101.765.490	100	92.67	163168	110.260.947.900	100	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			0	0	729960	62.964.850	192924	13.440.000	305881	20.381.250	582312	33.730.000	776383	56.632.510	776383	56.632.510	100	89.94	776383	110.260.947.900	100	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			0	0	198878	37.488.000	11226	0	11226	22.125.000	42184	25.040.000	173213	27.670.000	173213	27.670.000	87.1	73.81	173213	110.260.947.900	100	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			0	0	338467	34.285.000	73036	3.242.400	116289	9.786.150	229639	14.863.650	323938	32.616.150	323938	32.616.150	95.71	95.13	323938	110.260.947.900	100	100	Target tidak tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			0	0	34261	522.833.200	10356	0	15956	392.400.000	27342	499.554.065	36035	514.644.065	36035	514.644.065	100	98.43	36035	110.260.947.900	100	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang			0	0	2407	30.460.000	1401	2.045.030	1861	9.390.030	2267	14.385.030	2738	29.095.030	2738	29.095.030	100	95.52	2738	110.260.947.900	38.8	100	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang			0	0	14386	2.295.925.400	4964	11.393.750	8658	2.191.641.250	12081	2.200.488.750	17761	2.271.652.750	17761	2.271.652.750	100	98.94	17761	110.260.947.900	100	100	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang			0	0	25500	241.848.800	7301	7.496.250	14503	209.421.202	26002	218.573.452	36857	236.346.952	36857	236.346.952	100	97.73	36857	110.260.947.900	100	100	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen			0	0	1	48.910.000	1	9.449.000	1	17.361.750	1	36.674.250	1	43.479.250	1	43.479.250	100	88.9	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen			0	0	1	13.538.667.355	1	31.507.500	1	628.594.400	1	5.089.609.880	1	12.464.625.095	1	12.464.625.095	100	92.07	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen			0	0	1	100.823.200	1	7.835.000	1	9.260.000	1	70.010.000	1	100.702.000	1	100.702.000	100	99.88	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen			0	0	1	4.765.215.200	1	17.902.750	1	35.000.650	1	4.696.092.650	1	4.755.936.650	1	4.755.936.650	100	99.81	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen			0	0	1	247.912.800	1	0	1	4.750.000	1	85.175.000	1	242.131.950	1	242.131.950	100	97.67	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen			0	0	1	286.871.200	1	1.636.000	1	28.910.000	1	278.312.300	1	286.155.300	1	286.155.300	100	99.75	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen			0	0	1	77.607.000	1	11.572.500	1	23.242.500	1	51.417.500	1	61.440.000	1	61.440.000	100	79.17	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang			0	0	10	6.800.000	0	0	0	0	2.400.000	0	6.400.000	0	6.400.000	0	94.12	0	110.260.947.900	0	100	Data tidak tersedia	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen			0	0	1	2.833.848.350	1	214.268.250	1	1.884.756.800	1	2.313.454.800	1	2.800.510.700	1	2.800.510.700	100	98.82	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen			0	0	1	52.494.400.000	1	10.885.690.012	1	23.323.204.669	1	36.670.237.571	1	52.175.653.431	1	52.175.653.431	100	99.39	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket			0	0	65	14.780.000	11	800.000	11	1.850.000	67	2.900.000	102	3.675.000	102	3.675.000	100	24.86	102	110.260.947.900	1.45	100	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen			0	0	1	35.937.600	1	6.742.500	1	21.873.000	1	26.648.000	1	35.750.500	1	35.750.500	100	99.48	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen			0	0	1	290.262.500	0	8.432.300	0	103.914.980	1	106.407.480	1	262.821.630	1	262.821.630	100	90.55	1	110.260.947.900	0.01	100	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit			0	0	53	116.080.000	83	40.787.500	82	59.632.030	86	74.257.530	97	113.991.380	97	113.991.380	100	98.2	97	110.260.947.900	1.37	100	
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan			0	0	12	1.500.000	0	0	6	0	9	100.000	12	500.000	12	500.000	100	33.33	12	110.260.947.900	0.17	100	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit			0	0	1	206.899.995	1	17.205.000	1	113.905.402	1	179.942.652	1	200.216.328	1	200.216.328	100	96.77	1	110.260.947.900	0.01	100	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			0	0	2664	330.946.800	627	199.500.000	1361	199.500.000	1800	199.500.000	2747	323.500.000	2747	323.500.000	100	97.75	2747	110.260.947.900	38.93	100	

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPД yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun		Permasalahan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= (13/8)x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			0	0	184	150.190.800	63	0	123	39.560.400	195	139.790.400	253	139.790.400	253	139.790.400	100	93.08	253	110.260.947.900	3.59	100	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang			0	0	15	42.175.666	3	0	5	37.734.500	9	38.849.000	10	40.349.000	10	40.349.000	66.67	95.67	10	110.260.947.900	0.14	100	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen			0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	100	0	1	110.260.947.900	0.01	100	Target tercapai
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen			0	0	1	130.210.500	1	0	1	82.812.500	1	124.625.000	1	125.253.400	1	125.253.400	100	96.19	1	110.260.947.900	0.01	100	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	Persen	90	528.000.000	100	2.475.239.650	80	2.301.725.200	52.1	408.230.000	99.97	1.000.349.400	99.97	1.604.098.300	99.97	1.858.222.950	99.97	1.858.222.950	100	80.73	199.97	4.333.462.600	100	100	Target tercapai
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan di fasyankes yang diberikan rekomendasi izin praktik	Persen	100	2.686.200	100	3.000.000	100	1.745.000	100	0	100	1.745.000	100	1.745.000	100	1.745.000	100	1.745.000	100	100	200	1.861.222.950	100	100	
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen			0	0	1	1.745.000	1	0	1	1.745.000	1	1.745.000	1	1.745.000	1	1.745.000	100	100	1	1.858.222.950	1	100	Target tercapai
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi	Persen	100	147.335.650	100	1.540.504.650	100	1.436.670.000	42.5	192.705.000	100	614.529.400	100	991.627.800	100	1.047.384.750	100	1.047.384.750	100	72.9	200	3.398.727.600	100	100	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang			0	0	80	1.436.670.000	34	192.705.000	73	614.529.400	181	991.627.800	194	1.047.384.750	194	1.047.384.750	100	72.9	194	1.858.222.950	100	100	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes dengan jenis tenaga sesuai dengan ketentuan	Persen	80	31.890.760	100	931.735.000	70.0	863.310.200	85.29	215.525.000	79.41	384.075.000	85.29	610.725.500	85.29	809.093.200	85.29	809.093.200	100	93.72	185.29	2.789.957.950	100	100	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen			0	0	1	18.258.200	1	2.375.000	1	5.025.000	1	12.175.500	1	18.031.200	1	18.031.200	100	98.76	1	1.858.222.950	1.25	100	Target tercapai
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang			0	0	32	727.200.000	32	177.150.000	32	343.050.000	32	508.950.000	32	674.850.000	32	674.850.000	100	92.8	32	1.858.222.950	40	100	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen			0	0	1	117.852.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	89.600.000	1	116.212.000	1	116.212.000	100	98.61	1	1.858.222.950	1.25	100	Target tercapai
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Memenuhi Standar	Persen	62	226.000.000	99.9	318.468.750	58	104.697.050	50	21.492.000	50	42.820.200	55.12	74.165.200	95.5	96.120.200	95.5	96.120.200	100	91.81	195.4	414.588.950	100	100	Target tercapai
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan yang mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan	Persen	100	72.600.000	100	199.930.650	100	47.883.000	100	12.550.000	100	24.573.000	100	35.238.000	100	47.883.000	100	47.883.000	100	100	200	296.050.850	100	100	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen			0	0	1	47.883.000	1	12.550.000	1	24.573.000	1	35.238.000	1	47.883.000	1	47.883.000	100	100	1	96.120.200	1	100	Target tercapai
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa	Persentase Pelaku Usaha Tempat Pengelolaan Makanan yang mendapatkan sertifikat pelatihan	Persen	100	6.050.000	100	3.098.500	100	3.986.700	0	0	100	3.986.700	100	3.986.700	100	3.986.700	100	3.986.700	100	100	200	99.218.700	100	100	

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun		Permasalahan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= (13/8)x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	keamanan pangan siap saji																								
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen			0	0	1	3.986.700	1	0	1	3.986.700	1	3.986.700	1	3.986.700	1	3.986.700	100	100	1	96.120.200	1	100	Target tercapai
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan pembinaan	Persen	100	1.210.000	100	426.000	100	800.000	0	0	100	800.000	100	800.000	100	800.000	100	800.000	100	100	200	96.546.200	100	100	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen			0	0	1	800.000	1	0	1	800.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000	100	100	1	96.120.200	1	100	Target tercapai
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Presentase Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Persen	100	31.944.000	100	86.590.000	100	21.095.100	0	0	100	0	100	20.680.000	73.48	20.680.000	73.48	20.680.000	73.48	98.03	173.44	182.710.200	100	100	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit			0	0	362	21.095.100	0	0	268	0	268	20.680.000	268	20.680.000	268	20.680.000	74.03	98.03	268	96.120.200	100	100	
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Rumah Tangga	Persentase Pelaku Sarana produksi alat kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah tangga yang bersertifikat	Persen	100	72.600.000	100	13.093.600	100	17.471.750	100	0	100	0	100	0	100	9.310.000	100	9.310.000	100	53.29	200	109.213.800	100	100	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen			0	0	1	17.471.750	1	0	1	0	1	0	1	9.310.000	1	9.310.000	100	53.29	1	96.120.200	1	100	Target tercapai
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat rekomendasi izin operasional	Persen	100	20.406.650	100	15.330.000	100	13.460.500	100	8.942.000	100	13.460.500	100	13.460.500	100	13.460.500	100	13.460.500	100	100	200	111.450.200	100	100	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen			0	0	1	13.460.500	1	8.942.000	1	13.460.500	1	13.460.500	1	13.460.500	1	13.460.500	100	100	1	96.120.200	1	100	Target tercapai
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	70	598.091.626	45.82	1.015.644.890	50	293.945.000	0	27.398.500	0.14	136.930.500	29.69	158.135.000	31	271.874.200	31	271.874.200	62	92.49	76.82	1.287.519.090	100	100	Target tidak tercapai dikarenakan ada indikator yang tidak bisa dikendalikan (merokok)
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Sehat	Keluarga	120099	60.500.000	30	145.422.720	99255	36.366.500	0	0	109175	21.896.750	132348	28.271.750	132348	35.676.400	132348	35.676.400	100	98.1	132378.15	417.296.920	100	100	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen			0	0	1	36.366.500	1	0	1	21.896.750	1	28.271.750	1	35.676.400	1	35.676.400	100	98.1	1	271.874.200	0	100	Target tercapai

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun		Permasalahan
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= (13/8)x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Sehat	Rumah Tangga	85537	216.917.910	100	141.123.270	70692	122.506.400	0	6.606.500	447	53.374.000	22585	57.105.000	49136	113.073.700	49136	113.073.700	69.51	92.3	49236	412.997.470	57.56	100	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen			0	0	1	122.506.400	1	6.606.500	1	53.374.000	1	57.105.000	1	113.073.700	1	113.073.700	100	92.3	1	271.874.200	0	100	Target tercapai
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang naik strata	UKBM	242	115.239.372	5	729.098.900	200	1.826.956.600	0	80.959.500	0	507.152.250	105	1.203.005.750	111	1.707.792.600	111	1.707.792.600	55.5	93.48	116.18	1.000.973.100	48.01	100	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen			0	0	1	135.072.100	1	20.792.000	1	61.659.750	1	72.758.250	1	123.124.100	1	123.124.100	100	91.15	1	271.874.200	0.41	100	Target tercapai
Presentase capaian																					83.63%	92.35%					
Predikat capaian																					Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																											
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):																											

PENUGASAN BUPATI

1. BAKSOS KATARAK



2. Studi Tiru Pemkab Gresik Terkait Pelaksanaan UHC

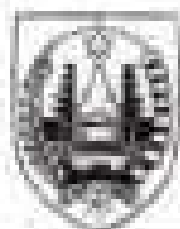


3. Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



4. Besut Buka Gerbang Emas





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Gatot Subroto No. 168 Jombang Tlp. (0321) 881434 Faks. (0321) 881428
JOMBANG

Jombang, 16 Agustus 2024

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang
di

JOMBANG

Nomor : X.700/520/415.15/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Tahun 2024

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjerjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.

- i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- j. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat.
- k. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/441/415.10.1.3/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/143/415.10.1.3/2024.
- l. Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/02/415.15/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektoral Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/002/4/415.15/2024.
- m. Surat Tugas atas nama Pj. Bupati Jombang Nomor: 700/0621/415.15/2024 Tanggal 7 Juni 2024, dilanjutkan dengan Surat Tugas Nomor: 700/0621/415.15/2024 Tanggal 28 Juni 2024, dan terakhir dengan Surat Tugas Nomor: 700/0646/415.15/2024 Tanggal 31 Juli 2024.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkhususan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjangka dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

Periode penilaian evaluasi SAKIP adalah Triwulan III Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemartaaan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, dengan prosedur evaluasi meliputi evaluasi dokumen SAKIP oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Jombang dan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memiliki Tugas yang diimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :



Sumber data : Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Peraturan, Struktur Organisasi, Urutan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mempunyai fungsi

- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SARIP Instansi Pemerintah/Unit

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar 80,01 dengan kategori (A) Memuaskan, sehingga didapat gambaran bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dan pengukuran kinerja telah dilakukan pada seluruh jenjang.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan formula perhitungan per komponen sebesar 80% nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan 20% hasil evaluasi lapangan, kecuali pada komponen Evaluasi Kinerja diperhitungkan 100% dari nilai LKE, sebagaimana rincian berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai LKE	Nilai Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian (Bobot)
1	2	3	4	5	6 (4xBobot+5xBobot)	7 (6-100 100%)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	19,22	25,36	84,54
2	Pengukuran Kinerja	30%	29,25	16,25	24,25	80,83
3	Pelaporan Kinerja	10%	11,66	8,09	12,18	80,96
4	Evaluasi Kinerja	20%	19,21	-	19,21	73,00
Total		100%			80,81	

^{*)} Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Peraturan Nomor 86 Tahun 2021

(Dalam point 1 s.d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE dan hasil evaluasi lapangan, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi).

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya sebanyak 8 (delapan) rekomendasi telah seluruhnya diindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, namun perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP belum dapat memberikan peningkatan yang maksimal, sehingga pada penilaian LKE Tahun 2024 masih ditemukan kondisi yang sama dengan periode sebelumnya.

9. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,41 dari bobot 30% atau dengan capaian 84,54% (BB) yang berarti bahwa kualitas kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan dan masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perbaikan, yaitu: (2.03.04)

a) Hasil evaluasi dokumen perencanaan kinerja, didapati catatan sebagai berikut :

- Kertas kerja penetapan target sebagai salah satu dokumen perencanaan belum cukup menggambarkan hasil yang akan dicapai, kondisi ini disebabkan penetapan target kinerja Tahun 2024 atas indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP, Nilai IRB dan Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (yang dicapai melalui 15 indikator program) tidak dilengkapi dengan argumen perhitungan yang logis berdasarkan basis data yang memadai.

- Atas penurunan capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat (yang dicapai melalui 15 indikator program) sebesar 12,77% (Tahun 2022 sebesar 77,86% dan Tahun 2023 sebesar 65,09%) disebabkan tidak adanya evaluasi secara periodik atas penetapan target kinerja tahun berikutnya dengan mengacu pada capaian tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat diketahui apakah penetapan target masih relevan

- b) Hasil evaluasi lapangan, didapat catatan bahwa sebagian kecil pegawai telah terlibat dalam perencanaan kinerja, namun belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 24,25 dan bobot 30% atau dengan capaian 80,83% (88) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu : (2.03.04)

- a) Hasil evaluasi dokumen pengukuran kinerja, didapat catatan sebagai berikut :
 - Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui aplikasi e-office, selain itu hasil pengukuran kinerja telah dikaitkan dengan reward & punishment sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Namun dalam implementasinya sebagaimana tertuang dalam kertas kerja perhitungan pemberian reward & punishment, diketahui bahwa komponen perhitungannya tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Atas Capaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
 - Pada dokumen pengukuran kinerja, dokumen evaluasi SKP, serta dokumen monitoring evaluasi rencana aksi masih ditemukan sebagian dokumen yang belum dilakukan umpan balik secara berkelanjutan dari pimpinan, sehingga hasil pengukuran kinerja belum dapat dijadikan dasar secara menyeluruh dalam melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien yang berdampak pada pencapaian kinerja.

- b) Hasil evaluasi lapangan, didapati catatan bahwa sebagian pegawai belum memahami bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan mengukur kinerja individu perlu memperimbangan capaian kinerja organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 12,15 dari bobot 15% atau dengan capaian 80,95% (BII) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu : (2.03.04)

- a) Hasil evaluasi dokumen pelaporan kinerja, didapati catatan bahwa informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- b) Hasil evaluasi lapangan, didapati catatan bahwa dalam upaya peningkatan kinerja telah dibuat inovasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pemberi layanan namun sebagian besar pegawai belum memahami hal tersebut serta laporan kinerja belum menggambarkan adanya perbaikan dari periode sebelumnya

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 18,25 dari bobot 25% atau dengan capaian 73,00% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), sehingga masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang belum maksimal, sehingga belum dapat dijadikan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung proses efektivitas dan efisiensi kinerja. (2.03.04)

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, agar : (09)

1) Melakukan perbaikan perencanaan kinerja, antara lain :

- a) Perbaikan dokumen perencanaan kinerja, yaitu :
 - Dalam melakukan penetapan target kinerja terutama pada Indikator Kinerja Utama agar mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan faktor lain yang mempengaruhi, serta memberikan argumen perhitungan yang logis berdasarkan basis data yang memadai
 - Melakukan evaluasi secara periodik atas penetapan target kinerja tahun berikutnya dengan mengacu pada capaian tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui apakah penetapan target masih relevan
- b) Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional

2) Melakukan perbaikan pengukuran kinerja, antara lain :

- a) Perbaikan dokumen pengukuran kinerja, yaitu :
 - Dalam implementasi perhitungan pemberian reward & punishment agar berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Atas Capaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
 - Agar lebih optimal dalam melakukan evaluasi/umpen baik secara berkelanjutan pada seluruh dokumen pengukuran kinerja, dokumen evaluasi SKP, serta dokumen monitoring evaluasi rencana aksi, sehingga dapat diketahui capaian kinerja setiap tribulan dan dapat segera dilakukan penyesuaian strategi, kebijakan dan anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien yang berdampak pada pencapaian kinerja
- b) Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/perangkat daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangan hasil pengukuran kinerja

3) Pelaporan Kinerja

- a) Agar memanfaatkan informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya
- b) Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Laporan kinerja perlu disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

10. Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian, diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang, yaitu pada evaluasi akuntabilitas kinerja dengan skor B yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).

b. Dorongan terhadap implementasi SARIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SARIP pada periode berikutnya khususnya pada sub komponen pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dan seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Mengetahui

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG


ABDUL MADIQ NINDIYAGUNG, S.H., M.Si, CGCAI
Pemangku Utama Muda
NIP. 19870105 199212 1 001

Tim Evaluasi

Penanggung Jawab Pembantu


LILIES WIDANINGSIH, S.E., M.Si

Pengendali Teknis


RIRIS ERNAWATI, S.E., M.M.

Ketua Tim


NINA ROSALINA, S.E.

Anggota Tim

1. YOGA PRATAMA, S.E. 

2. DWI PUJI SULISTIYA, A.Md. 

3. ZUAMA BIRGHMATIKA, A.Md.Ak. 



Jombang, 11 Desember 2024

Nomor	: 000.8.6/9930/415.10/2024	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Lampiran	: Lima Lembar	di
Hal	: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Jombang

Sesuai dengan:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- c. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/39/415.10.1.3/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Tim Evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah,

kami telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat dinamis, holistik, orientasi hasil, kolaboratif, sinergis, dan kontinuitas.

Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Atas dasar hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal yaitu:

- a. Ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan;
- b. Keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kegiatan utama; dan
- c. Dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kami sampaikan kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

- 1. Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah **77,47** dengan kategori **BB** predikat **“Sangat Baik”**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:



Kode Unit: 415.10.3.3

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	5,97
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,25
	Rencana Aksi	4%	2,33
	Monitoring dan Evaluasi	4%	2,39
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	71,49
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	40,44
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	31,05
NILAI RB PERANGKAT DAERAH		100%	77,47

2. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan dan rekomendasi pada setiap indikator tercantum dalam lampiran surat ini.
- Demikian untuk menjadikan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik

{ttd}

AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP 197207101998031010



Kode Unit: 415.10.3.3

Lampiran : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2024
Nomor : 000.8.6/9930/415.10/2024
Tanggal : 11 Desember 2024

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10	5.97		• Belum terlihat kontribusi Agen Perubahan terhadap Perubahan pada unit kerja • Masih terdapat hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti • Kualitas rencana aksi masih belum optimal, beberapa rencana aksi hanya berfokus pada pemenuhan dokumen • Kurang optimalnya proses Monev Internal dalam mengawal dan memastikan kualitas perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan RB dalam rangka memaksimalkan capaian pembangunan RB.	• Lakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya tim pembangunan RB • Libatkan Agen perubahan dalam mengawal perubahan organisasi dan didokumentasikan serta dilakukan monev capaian secara berkelanjutan • Lakukan analisis dan pahami seluruh catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB ini yang kemudian disusun rencana tindak lanjut dan direalisasikan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap pembangunan RB secara optimal • Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini • Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi	
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH						
2.1	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang						
2.1.1	Tingkat Penataan	0-100					Bagian



Kode Unit: 415.10.3.3

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
	Kelembagaan Perangkat Daerah						Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0-5	2.00	Cukup	Tim kerja yang telah dibentuk belum mencerminkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, MPH yang disajikan adalah MPH Perangkat Daerah dan bukan merupakan MPH Tim Kerja	Segera menyesuaikan pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan dikelola dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.3	Indeks Penerapan SPBE	0-100	86.30	Baik Sekali			Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0-100	96.99	SANGAT BAIK			BAPPEDA
2.1.5	Nilai SAKIP	0-100	80.01	A	Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat pada uraian poin 9 huruf a Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum diuraikan pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.6	Tingkat Digitalisasi Layanan	0-100	100.00	A -- Sangat Tinggi			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.7	Tingkat Pembangunan ZI	0-5	4.00		Beberapa unit kerja sudah mendapatkan WBK dan namun tidak terlihat adanya keberlanjutan proses baik unit yang telah mendapatkan predikat maupun unit lain termasuk Dinas Kesehatan sendiri	Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan pengutaaan dan perbaikan program pada seluruh unit kerja maupun unit induk (Dinas Kesehatan) sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apabila memungkinkan dapat mengajukan kembali untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.8	Maturitas SPIP	0-5	3	Terdefinisi	Nilai SPIP mengikuti nilai maturitas SPIP	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan	Inspektorat



Kode Unit: 415.10.3.3

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
					Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang dilakukan oleh BPKP	seluruh pegawai tentang implementasi SPIP mulai dari menciptakan lingkungan pengendalian, Manajemen Risiko hingga pemantauan pengendalian intern	
2.1.9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1-5	3.00	Cukup Baik	Kualitas tindak lanjut aduan kurang baik dan kurang responsif, Pelapor kurang puas dengan pelayanan yang diberikan	Disarankan untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, Monitoring secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait dalam menindak lanjuti aduan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, Mengarahkan Perangkat Daerah terkait tentang pentingnya menindaklanjuti aduan secara substantif yang disampaikan oleh masyarakat, Perlu dilakukan perbaikan pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0-4	3.59	Kurang bersih dari korupsi	Jarang terjadi praktik korupsi	Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, serta menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.11	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	70.95	BB (Sangat Baik)		- Unit Pengolah agar menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan. - Pembuatan Daftar arsip inaktif yang dipindahkan pada Unit Pengolah agar ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah/unit kerja sebagai pihak yang memindahkan dan unit kearsipan sebagai pihak yang menerima. - Unit Kearsipan agar melakukan penyimpanan seluruh arsip inaktif yang berasal dari Unit Pengolah di lingkungannya serta dibuatkan daftar arsip inaktif - Unit Kearsipan agar melakukan pengadaan arsiparis - Unit Kearsipan agar melengkapi sarana dan prasarana di record center	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.1.12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0-100	95.00		penyelesaian e katalog 52%	Agar menyelesaikan paket E katalog sampai ke Penilaian Penyedia	Bagian PBJ Sekretariat daerah
2.1.13	Indeks Pengelolaan	0-100	95.72	A	Memuaskan		BPKAD



Kode Unit: 415.10.3.3

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
	Keuangan						
2.1.14	Indeks Pengelolaan Aset	0-100	82.36	Baik	1. Untuk Indikator Persentase Ketepatan Perencanaan Dengan Realisasi Pengadaan BMD, maka Perangkat Daerah di dalam menyusun RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan harus selaras dengan riil Aset/BMD yang akan dibeli atau dipelihara oleh perangkat daerah. Sebagai contoh jika membutuhkan 5 Lap top maka di RKBMD juga tertulis pengadaan 5 Laptop, bukan PC atau Notebook. Selanjutnya di RKA juga harus tertulis 5 Lap top. Sehingga dari RKBMD, RKA sampai dengan riil barang yang dibeli sama. Karena masih dijumpai antara RKBMD dan RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian. Atau contoh kasus lain tidak tercantum dalam RKBMD, tetapi dicantumkan dalam RKA sehingga hal ini juga mengurangi nilai. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah RKMD dan RKA sudah sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sesuai, hal ini juga dapat mengurangi nilai. Jadi dibutuhkan komunikasi yang baik antara seluruh elemen di dalam perangkat daerah sehingga tercipta keselarasan informasi yang dituangkan dalam dokumen secara benar. Dilihat dari sisi pemeliharaan juga harus diperhatikan. Yang boleh dipelihara adalah barang dalam kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak berat tidak diperkenankan untuk dipelihara. Selain itu yang boleh dianggarkan pemeliharaannya adalah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum tercatat di dalam KIB maka tidak bisa dianggarkan belanja pemeliharaannya. 2. Untuk Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan BMD, maka yang harus diperhatikan adalah batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Yang harus diperhatikan bagi perangkat daerah adalah batas waktu ini adalah batas waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan salah satu poin indikator MCP KPK dimana pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD dari perangkat daerah untuk diupload dalam aplikasi sijaga milik MCP KPK. Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik maupun fisik. 3. Untuk Indikator Persentase Capaian Entry Data Pengadaan BMD Dalam Sistem Informasi BMD Per 31 Desember, maka yang harus diperhatikan adalah updating data penatausahaan BMD baik pengadaan, mutasi, penghapusan, pemanfaatan dalam sistem aplikasi BMD, dimana ada tenggat waktu yang diberikan oleh MCP KPK adalah satu hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Hal ini berkaitan dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang dituangkan di dalam TOR/KAK dengan harapan adalah tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, sehingga dengan berakhirnya tahun anggaran diharapkan proses input data dalam aplikasi BMD juga selesai. Adapun data pembandingnya merupakan data realisasi anggaran per 31 Desember pada masing-masing perangkat daerah.	BPKAD	
2.1.15	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0-100	93.01				Inspektorat

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
2.2	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional						
2.2.1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0-100	99.75	Optimal		Agar dilakukan dialog kinerja dan/atau pembinaan bagi Pegawai yang status nilainya mendapatkan predikat Butuh Perbaikan 1 orang , Kurang 1 orang dan Sangat Kurang 1 orang.	BKPSDM
2.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	0-100	81.15	Tinggi	Agar ditingkatkan nilai pada dimensi kompetensi karena masih 29.59 dari Nilai Kompetensi maks 40. dan Kinerja 24.99 dari Nilai Kinerja maks 30, Disiplin 4.99 dari Nilai maks 5	Agar capaian kinerja organisasi ditingkatkan supaya bisa mendapatkan predikat Istimewa dan nilai kinerja juga bisa maksimal, serta dilakukan pembinaan terutama bagi ASN yang terkena hukuman disiplin	BKPSDM
2.2.3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0-4	2.00		Telah dilaksanakan internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN melalui sosialisasi dan penggunaan media interaktif namun belum dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan	Melanjutkan upaya internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat diterima seluruh pegawai sampai dengan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.2.4	Indeks Pelayanan Publik	0-5	4.19	(A-) Sangat Baik	sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP	sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	0-100	85.12	B (Baik)	Untuk dapat ditingkatkan lagi perolehan IKM-nya	untuk dilakukan upaya perbaikan 3 unsur terendah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAN 4 TAHUN 2024

- 1

NAMA

: dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP
- 2

NIP

: 197106082002121006
- 3

PANGKAT/GOL RUANG

: Pembina Utama Muda/IV c
- 4

JABATAN

: Kepala Dinas Kesehatan
- 5

UNIT KERJA

: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI TRIBULAN 4	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI		
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	1,13	0,99	88%	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	97.616.277.880	90.064.034.416	92,26%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan optimal	Monitoring dan evaluasi pencapaian realisasi anggaran dan kinerja
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	100%	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	217.654.908.474	209.340.882.347,27	96,18%		
		Nilai IRB	B	BB	100%	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.301.725.200	1.858.222.950	80,73%		
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	81,10%	81%	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	104.697.050	96.120.200	91,81%		
4	Meningkatnya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	80%	99,97%	125%	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.985.829.500	1.827.552.700	92,03%		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI TRIBULAN 4	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI		
5	Meningkatnya Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	50%	31,00%	62,00%							
6	Meningkatnya Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	100 per 100.000 KH	108,73/100 .000KH	91%							
		2. - Angka Kematian Bayi (AKB)	6,6 per 1000 KH	8,01/1.000 KH	79%							
		3. - Angka Kematian Balita	1 per 1000 KH	0,15/1.000 KH	120%							
		4. - Prevalensi Stunting	9%	4,46%	120%							
		5. - Persentase kecamatan sehat	33,33%	33,33%	100%							
		6. - Universal Health Coverage (UHC)	98%	97,79%	100%							
		7. - Persentase Desa UCI	88%	56,86%	65%							
		8. - Insiden Rate Penyakit Menular	1,25%	0,95%	76%							
		9. - Tingkat kemandirian ODGJ Berat	80%	72,05%	90%							
		10. - Insiden Rate Diabetes Mellitus dan Hipertensi	50%	84,50%	31%							
		11. - Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar	85%	95,00%	112%							
		12. - Persentase Ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar	94%	99,50%	106%							
7	Meningkatnya Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	58%	95,5%	165%							

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI TRIBULAN 4	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI		
8	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	Persentase penyelesaian penugasan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditentukanAtasan Langsung	95%	100%	105%							
TOTAL					95,73%			319.663.438.104	303.186.812.614	94,85%		



Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010

Jombang, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan



dr. HEXAWAN TJAHJA WIDADA, MKP
NIP.197106082002121006